



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONFLIK ANTARA MAROKO DAN FRONT POLISARIO
DI SAHARA BARAT:
Penyelesaian Konflik dalam Konteks Hubungan Internasional**

TESIS

**MOHAMMAD ALIARDO
0706192842**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : **MOHAMMAD ALIARDO**

NPM : 0706192842

Tanda tangan :

Tanggal : 15 Juli 2009

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : **MOHAMMAD ALIARDO**
NPM : 0706192842
Kekhususan : Politik Dan Hubungan Internasional Timur Tengah
Judul Tesis : **KONFLIK ANTARA MAROKO DAN POLISARIO DI SAHARA BARAT: Penyelesaian Konflik dalam Konteks Hubungan Internasional**
Tanggal : 15 Juli 2009

Pembimbing Tesis



Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Mohammad Aliardo
NPM : 0706192842
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Konflik Antara Maroko dan Polisario di Sahara Barat:
Penyelesaian Konflik dalam Konteks Hubungan Internasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Timur Tengah dan Islam ~~Fakultas~~ Program Pascasarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si (.....)

Pembimbing : Achmad Ramzy Tajoedin, MPA (.....)

Penguji : Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si (.....)

Reader/ Pembaca Ahli : Zainuddin Djafar, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang lebih pantas diucapkan oleh penulis kecuali Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat taufik, hidayah, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Seiring dengan penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memandu penyelesaian tesis ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Musthafa Edwin Nasution, Ph.D, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Bapak Achmad Ramzy Tadjoedin, BA., MPA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pemikiran, tenaga dan memberikan ilmunya kepada penulis dan hal ini sungguh merupakan penghormatan kepada penulis berada dibawah bimbingan beliau.
3. Bapak Drs. Hanief Saha Ghafur, M.Si sebagai Ketua Sidang, Bapak M. Hamdan Basyar, MA. selaku penguji dan Bapak Dr. Zainuddin Djafar, M.A selaku Reader/Pembaca Ahli yang telah memberikan kritik dan masukan sehingga penelitian yang penulis lakukan telah menemukan konteksnya.
4. Seluruh Guru Besar, Dosen Pengajar, dan Staf Akademik pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Kekhususan Politik dan Hubungan Internasional.
5. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, H. Ir. Muta'alim Minhaj dan Hj. Asna Muyasaroh, yang telah meluangkan waktu-waktunya untuk mendoakan kami sehingga dapat merampungkan tesis tepat pada waktunya.
6. Istri tersayang, Yuli Damayanti serta calon anak ku yang sedang berada dalam kandungan, yang telah membangkitkan inspirasi-inspirasi hidup dan semangat berbuat benar serta bertindak yang terbaik.

7. Kakanda Khalif Ahadi yang saat ini juga sedang berjuang melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia (semoga berhasil). Juga tak lupa kepada adinda Maharati Hamida dan Indra serta Hamaas.
8. Bapak Dr. H.M Syahrial Yusuf, Pemilik dan Pimpinan LP3I GROUP, beserta seluruh jajaran pimpinan dan karyawan LP3I Group, STIAMI, dan UI Azzahra yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini, sesuai dengan target yang telah ditentukan.
9. Kawan-kawan seperjuangan angkatan ke tiga belas, Anwar Nuris, Khalifatullah Al Khawarizmi, Wirawan Sukarwo, dan tak lupa Husen dan Wiwied, yang telah bersedia mendukung dalam perkuliahan pada program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam kekhususan Politik dan Hubungan Internasional maupun dalam penyelesaian tesis ini.
10. Pihak-pihak lain yang juga telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di program pasca sarjana, Tanoto Foundation (terima kasih atas dukungan beasiswanya), kawan-kawan seperjuangan di “jalanan”: Bang Eko ‘Item’ Maryadi, Yodisman dan Fida, Fiesta, Sam, Pihri, Arul, Abigail, Febri, Muradi, Raindra, Barly, Yuliandre, Tendi, Hikmat, Teman-teman IMSS, Mas Eddy, Untung, Subek, Woyo, Aliq, Husni, dll.

Penulis berdoa semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini akan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan pahala yang besar dari Allah swt.

Jakarta, 15 Juli 2009

Mohammad Aliardo

ABSTRAKSI
KONFLIK ANTARA MAROKO DAN FRONT POLISARIO
DI SAHARA BARAT:

Penyelesaian Konflik dalam Konteks Hubungan Internasional

MOHAMMAD ALIARDO

Politik dan Hubungan Internasional
Program Studi Timur Tengah dan Islam

Sahara Barat merupakan sebuah wilayah di Afrika Utara yang pernah menjadi koloni Spanyol. Selama berabad-abad sejak abad ke 11 sampai abad ke 19 Masehi Sahara Barat merupakan penghubung antara Sub Sahara dengan Wilayah Sahara Barat. Sekitar pertengahan abad ke 11 masehi, Konfederasi Sanhaja beraliansi dengan suku Lamtuna untuk mendirikan dinasti Almoravid yang kekuasaannya saat ini meliputi Maroko, Tlemcen, semenanjung Iberia hingga ke utara meliputi Mauritania, Senegal dan Mali kemudian ke selatan meliputi kerajaan Ghana. Pada Abad ke 16 masehi, Dinasti Saadi Arab menaklukan Kerajaan Songhai yang berada di sekitar Sungai Niger. Perdagangan Trans Sahara menjadikan Sahara Barat sebagai jalur strategis antara Timbuktu yang berada di Mali dengan Marakesh.

Tahun 1884 dalam konferensi Berlin, Spanyol mendapatkan Sahara Barat sehingga selanjutnya Sahara Barat dikenal juga dengan Sahara Spanyol. 10 Mei tahun 1973, sebuah organisasi pembebasan kawasan Sahara Barat di utara Afrika bernama Polisario dibentuk. Organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol itu mendapatkan sambutan meluas dari masyarakat setempat. Sepuluh hari setelah dideklarasikan Front Polisario melancarkan serangan untuk pertama kalinya terhadap angkatan darat Spanyol.

Sebuah kesepakatan antara Spanyol, Mauritania, dan Maroko secara diam-diam dibuat oleh Spanyol yang pada saat itu mengalami permasalahan politik dan ekonomi dalam negeri serta mendapat tekanan dari komunitas internasional terutama PBB yang mengeluarkan resolusi tahun 1960 tentang dekolonisasi negara-negara *non self-government*. Selain itu, Spanyol juga baru mengalami keguncangan politik dalam negeri yang mengakibatkan terjadinya perubahan rezim di Spanyol.

Kesepakatan yang dibangun antara Spanyol, Mauritania, dan Maroko adalah pembagian kawasan Sahara Barat kepada Mauritania dan Maroko oleh Spanyol. Hal inilah kemudian yang membuat Polisario sebagai kelompok perlawanan masyarakat Sahara Barat yang bertujuan untuk kemerdekaan Sahara Barat dan mendapat dukungan Al Jazair, melakukan perlawanan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan sejak tahun 1975 hingga saat ini.

Kata Kunci: Konflik di Sahara Barat, Penyelesaian konflik dalam konteks Hubungan Internasional.

ABSTRACTION

CONFLICT BETWEEN MAROKO DAN FRONT POLISARIO IN SAHARA BARAT:

Conflict Resolution in a Context of the International Relationship

MOHAMMAD ALIARDO

Political and International Relationship
Program of Middle East and Islam Studies

Western Sahara is a region in North African which has ever become colony of Spanyol. During for centuries since century 11 until century 19 Masehi Western Sahara was link between Sub Sahara with Regions Western Sahara. About mid of century 11 masehi, Confederacy Sanhaja alliance with tribe Lamtuna for building dynasty Almoravid the power is in this time cover Marocco, Tlemcen, peninsula Iberia is finite to north cover Mauritania, Senegal and Mali then to south cover empire of Ghana. At Century 16 masehi, Dynasty Saadi Arab conquered Empire of Songhai residing in about Niger river. Commerce of Trans Sahara makes Western Sahara as strategic line between Timbuktu residing in Mali with Marakesh.

Year 1884 in Line conference, Spanyol get Western Sahara so that hereinafter Sahara Barat recognized also with Sahara Spanyol. 10 May year 1973, an organization liberation of area of Western Sahara in north of African so called Polisario is formed. organization with aim to fight for independence of area of Western Sahara from Spanyol colony get greeting extend from local public. Ten day after declaration Front Polisario launch attack for the first time his (it's to ground forces Spanyol).

a agreement between Spanyol, Mauritania, and Marocco on the quiet made by Spanyol which at that moment experience problems of domestic economics and politics and also getting pressure from international community especially PBB spending resolution year 1960 concerning nations decolonization non self-government. Besides, Spanyol also newly experience disputes home affairs politics resulting the happening of change of regime in Spanyol.

Agreement which woke up between Spanyol, Mauritania, and Marocco is area by territory of Western Sahara to Marocco and Mauritania by Spanyol. The this is then making Polisario as a group resistance of public Western Sahara with aim to independence of Western Sahara and getting support Al Jazair, make against and generate endless conflict since year 1975 was finite in this time.

Keyword: Conflict in Western Sahara, Conflict resolution in context The International Relationship.

النزاع بين المغرب العربي و كتائب بولساريو في الصحراء الغرب حل النزاع في إطار العلاقة الدولية

محمد علي أرض
التجريد

الصحراء الغربية جزء من منطقة إفريقيا الشمالية التي كان تحت احتلال ألمانيا . منذ قرون سابقة من قرن الحادي عشر إلى التاسع عشر للميلاد قد صارت معبرا بين الصحاري إلى أن وصل الصحراء الغربي . عقد التحالف بين جماعة سانهاجا و قبيلة لامتونا لقيام الدولة المرافيدية التي كانت تمتد ولايته من المغرب العربي و التلمسان و شبه إيبيريا حتى المناطق الجنوبية من موريتانيا و سنغال و مالي ثم غانا في الجنوب . في القرن السادس عشر استولت دولة السعدي العربية على الدولة سانهايا الواقعة حول ضفة نيجريا . التجارة عبر المناطق الصحراوية تجعل الصحراء الغربي خطوطا مهما هذه الخطوط تقع بين نيمبكتو في مالي إلى مراكش .

استحق ألمانيا الصحراء الغربي في عام 1118 م بعقد مؤتمر بيرلين ثم عرف الصحراء الغربي بعد ذلك بـ صحراء ألمانيا . أنشئت كتائب بولساريو في العاشر من مايو سنة 1973 م ، هذه الكتائب تعمل لتحرير منطقة الصحراء الغربي في جنوب إفريقيا من استيلاء ألمانيا . هذه الكتائب تنال إقبالا و رواجاً من قبل المجتمع ، ففي اليوم العاشر من إنشائها وجهت المقاومة الحربية ضد جيوش ألمانيا . مع هذه المناسبة تعمل ألمانيا إتفاقيات مع موريتانيا و المغرب العربي متسللا ، حيث كانت الأزمة الاقتصادية والسياسية تقع في ألمانيا بالإضافة إلى ضغط من قبل الأمم المتحدة بإصدار قرار عام 1960 التي يمنع من احتلال المناطق اللا حاكمة (non self-government) . بالمناسبة كانت الاضطراب والمشاكل السياسية تقع داخل ألمانيا نفسها فسببت تغيير الحاكم ونصبه من جديد .

إن إتفاقيات بين ألمانيا و موريتانيا و المغرب العربي فيها تقسيم الصحراء الغربي من قبل ألمانيا إلى كلتا الدولتين . هذا هو السبب الذي يجعل كتائب بولساريو تنصب المقاومة ضد أصحاب المصالح فضلا عن مساندة الجزائر في المقاومة ثم استمر ذلك منذ 1975 حتى الآن .

الكلمات المفتاحية : نزاع في صحراء الغربي ، حل النزاع في إطار العلاقة الدولية

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
AL-KHULASHAH	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Masalah	3
1.2.1 Identifikasi Masalah	3
1.2.2 Pembatasan Masalah	3
1.2.3 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Sistematika Pembahasan	5
BAB II : KERANGKA TEORI	7
2.1. Teori Konflik	7
2.1.1. Pengertian Konflik	7
2.1.2. Penyebab Konflik	8

2.1.3. Jenis Konflik	13
2.1.4. Konflik Politik	16
2.2. Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Diplomasi dan Hubungan Internasional	17
2.2.1. Diplomasi Dan Hubungan Internasional.	17
2.2.2. Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Internasional.	18
2.2.2.1. Penyelesaian Sengketa Dalam Piagam PBB.	20
2.2.2.2. Penyelesaian Sengketa Secara Diplomasi	21
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Pengantar	28
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2.1. Batasan Objek Masalah	31
3.2.2. Karakteristik Data	31
3.3. Paradigma Penelitian	32
3.4. Metode Penelitian	33
3.5. Metode Pengumpulan Data	35
3.6. Analisis Data Kasus	36
 BAB IV: PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAROKO DENGAN FRONT POLISARIO DI SAHARA BARAT	42
4.1 Kronologis Konflik di Sahara Barat.	42
4.1.1 Sejarah dan Akar Konflik di Sahara Barat	42
4.1.2 Kronologis Konflik di Sahara Barat	44
4.2 Pemetaan Aktor-Aktor Yang Terkait Dalam Konflik di Sahara Barat.	47
4.2.1 Kerajaan Maroko	47
4.2.2 Front Polisario	51
4.2.3 Kerajaan Spanyol	54
4.2.4 Mauritania	55
4.2.5 Aljazair.	58

4.3 Analisa Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Konflik di Sahara Barat	60
4.3.1. Potensi Sahara Barat Dilihat Dari Sudut Pandang GeoEkonomi Bagi Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik . . .	61
4.3.2. Geo Politik dan Nilai Strategis Sahara Barat	63
4.4 Penyelesaian Konflik di Sahara Barat Antara Kerajaan Maroko dengan Front Polisario Dalam Konteks Diplomasi dan Hubungan Internasional	68
4.4.1 Proses Penyelesaian Konflik di Sahara Barat	68
4.4.2 Penyelesaian Konflik di Sahara Barat Dalam Konteks Diplomasi dan Hubungan Internasional	73
4.4.2.1 Keterlibatan Organisasi Persatuan Afrika/OAU Dalam Penyelesaian Konflik di Sahara Barat	73
4.4.2.2 Keterlibatan PBB Dalam Penyelesaian Konflik di Sahara Barat	75
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

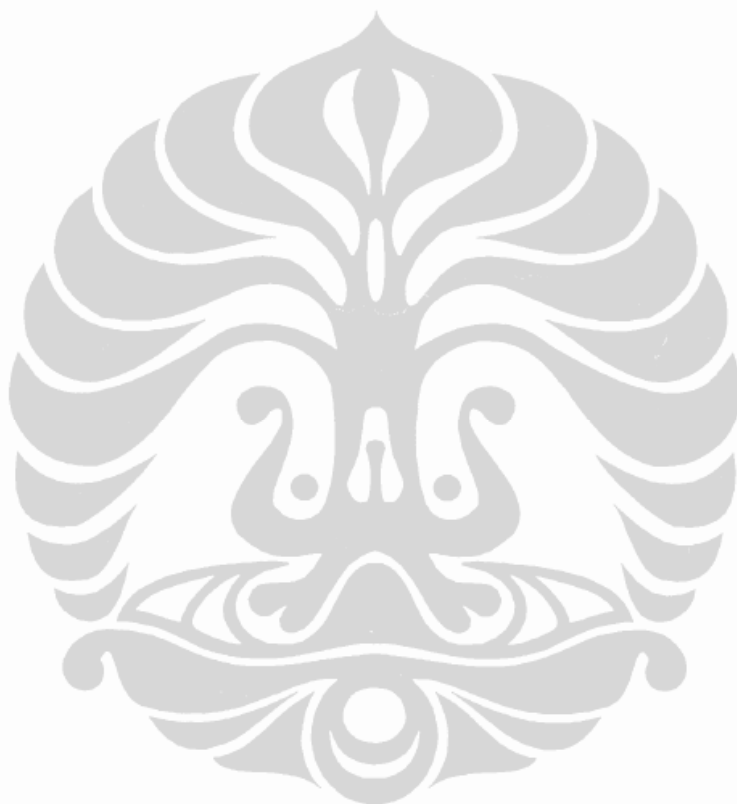
3.1. Komponen Analisis Data Model Alir (Flow Model)	37
3.2. Alur Teknis Analisis	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)	38
3.2. Alur Penelitian	40
3.3. Flowchart Metodologi Penelitian	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peta Sahara Barat, Kerajaan Maroko, Mauritania, Spanyol,
dan Aljazair
- Lampiran II : Foto-Foto Angkatan Perang Front Polisario



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Separatisme merupakan isu internasional yang cukup sensitif. Menurut data sejak tahun 1950-an, sekitar 70 kelompok etnis di dunia yang terlibat dalam perjuangan senjata bagi penentuan nasib sendiri atau gerakan separatisme. Angka tersebut tentu saja lebih tinggi dari perang antar-negara yang terjadi sejak akhir Perang Dunia ke-2.¹

Dalam masa pascaperang dingin, paling tidak ada delapan peradaban dunia yang saling berhadap-hadapan untuk membangun kekuasaan: Barat, Islam, Jepang, Ortodoks (Rusia), Hindu, Amerika Latin, Afrika, dan Cina (Konfusianisme), di mana Islam dan Konfusianisme merupakan dua peradaban yang sangat menonjol untuk mengatasi peradaban Barat. Politik menurut Huntington bukan hanya berdasarkan kepentingan, melainkan juga penampakan identitas (kebudayaan): etnik, agama, bahasa, golongan.²

Sejak tahun 2003, telah terjadi 22 konflik yang tetap berlangsung tanpa adanya penyelesaian. Di antaranya adalah Oromo dan Somali di Ethiopia, Chechnya di Rusia serta pemberontakan Tripura, Assam serta Muslim Kashmir di India. Sementara itu untuk periode tahun 2001-2002, terdapat tiga kasus yang merupakan konflik baru serta 22 kasus merupakan kelanjutan dari konflik yang telah berlangsung lama. Hanya 9 kasus gerakan separatisme yang bisa diselesaikan selama masa waktu tersebut.³

Namun demikian dalam kasus konflik yang terjadi di Afrika, kondisi ini diperparah dengan beberapa hal. Misalnya, kegagalan kebijakan pembangunan yang berasal dari pemerintah maupun dari komunitas internasional. Kebijakan pembangunan yang gagal dapat dilihat dari dampak

¹ Data Dewan Keamanan PBB, www.un.org

² Samuel P. Huntington, 1996, *The Clash of civilizations and the Remaking of World Order*, London: Simon & Schuster, hal. 21

³ Data Dewan Keamanan PBB, *Opcit.*

Structural Adjustment Program yang diberlakukan donor internasional yang mendorong pada dislokasi sumber daya ekonomi yang semakin parah.

Selain itu, pemerintah di kawasan Afrika juga gagal untuk melakukan manajemen konflik yang memadai. Ini muncul, misalnya, dalam bentuk penggunaan birokrasi keamanan untuk melumpuhkan perbedaan pendapat, dan keengganan untuk bernegosiasi dengan kelompok oposisi bersenjata.

Hal ini dapat dilihat dari kasus yang sedang terjadi di kawasan Afrika Utara yang merupakan hasil dari kolonialisme di era 1880 sampai awal tahun 1990 an yaitu kawasan Sahara Barat.

Sahara Barat merupakan sebuah wilayah di Afrika Utara yang pernah menjadi koloni Spanyol. Namun sejak Spanyol meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1975, wilayah tersebut menjadi ajang perebutan antara Front Polisario yang didukung oleh Aljazair dengan Pemerintah Kerajaan Maroko.⁴

Konflik Sahara Barat merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Lebih dari 30 tahun setelah konflik ini dimulai hingga pada akhirnya pada tahun 1991 terjadi gencatan senjata antara kelompok yang bertikai. Ini sangatlah penting, karena semua kelompok yang terlibat – Maroko, Aljazair dan Front Polisario, serta Negara Barat – menawarkan penyelesaian damai untuk Sahara Barat.

Selama ini Maroko dituding telah mencaplok dua pertiga wilayah Sahara Barat pada tahun 1976 dan kemudian mencaplok sisanya pada tahun 1979 setelah Mauritania menarik diri. Sejak itu terjadi perang gerilya Polisario memperjuangkan kemerdekaan wilayah. Konflik itu berakhir tahun 1991 setelah PBB masuk untuk menengahi konflik yang terjadi di Sahara Barat.

Melalui peran mediasi PBB yang merujuk resolusi Dewan Keamanan PBB 690 tanggal 29 April 1991, pemerintahan Kerajaan Maroko dan Front Polisario setuju

⁴ Wikipedia, www.wikipedia.com
2 ibid

melakukan gencatan senjata. Maroko menjanjikan akan adanya referendum kepada wilayah Sahara Barat untuk menentukan sikapnya sendiri, namun hingga saat ini jalan keluar penyelesaian Sahara Barat belum terlaksana.

1.2 Pokok Masalah

Identifikasi Masalah

1. Konflik antara Maroko dengan Front Polisario terjadi sejak Spanyol meninggalkan Sahara Barat pada tahun 1975 dan Maroko memasuki Sahara Barat pada tanggal 6 November 1975 .
2. Keberadaan Maroko di Sahara Barat mendapatkan dukungan dari beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa, sedangkan Front Polisario mendapat dukungan dari Al Jazair dan negara-negara di Afrika lainnya.
3. Gencatan senjata dilaksanakan pada tahun 1991 dalam kerangka mendukung pelaksanaan referendum dan penyelesaian damai antara Maroko dengan Front Polisario dengan difasilitasi oleh Misi PBB (Minurso) di Sahara Barat.
4. Hingga saat ini belum ada jalan keluar dalam penyelesaian konflik di Sahara Barat.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembahasan tentang permasalahan konflik antara Kerajaan Maroko dengan Front Polisario di Sahara Barat akan dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut diantaranya, dengan mencoba mengidentifikasi kedudukan konflik di Sahara Barat melalui upaya penguraian sejarah konflik di Sahara Barat serta memetakan aktor-aktor yang terlibat secara aktif dalam Konflik di Sahara Barat, dan merumuskan upaya penyelesaian konflik di Sahara Barat dalam Konteks Hubungan Internasional.

Upaya pembatasan masalah ini dilakukan agar dalam pemaparan dan penyampaian tesis ini tidak melebar dan tetap fokus pada konteks masalah yang akan dibahas sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

1.2.3 Perumusan Masalah

Persoalan Sahara Barat yang kaya fosfat, perikanan dan potensi sumber daya alam lainnya telah meracuni hubungan Maroko dengan Aljazair yang mendukung Polisario, di samping menghalangi kemajuan Afrika utara.

Masalah Polisario bertambah pelik setelah di PBB bertabrakan dua kubu antara Prancis dan Amerika Serikat yang mendukung Maroko dengan Aljazair dan Afrika Selatan serta beberapa negara yang mendukung Polisario.

Atas dasar fakta semacam ini, penelitian ini hendak menganalisa berbagai permasalahan yang berkait-erat dengan konflik antara Maroko dan Front Polisario. Karenanya, fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi konflik antara Maroko dan Front Polisario?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara Maroko dan Front Polisario?
3. Bagaimana penyelesaian konflik antara Maroko dan Front Polisario dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipahami oleh banyak orang dalam dunia penelitian bahwa tujuan penelitian harus berbanding lurus dengan fokus permasalahan yang menjadi konsen utama dari sebuah penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah merupakan implementasi logis dari rumusan penelitian.

Berangkat dari paradigma inilah, maka tujuan penelitian yang mengambil tema "Konflik Antara Kerajaan Maroko dan Front Polisario di Sahara Barat: Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Hubungan Internasional" ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memaparkan kronologis terjadinya konflik di Sahara Barat terutama terkait dengan konflik antara Maroko dengan Polisario.
2. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara Maroko dan Front Polisario

3. Menjelaskan solusi penyelesaian konflik menggunakan jalur diplomasi dan hubungan internasional di Sahara Barat.

1.4 Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memudahkan alur-pikir pembahasan tesis ini, maka tesis ini akan dibagi kedalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Pembagian bab dalam tesis ini adalah sebagai berikut, pada Bab pertama, penelitian tesis ini merupakan pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, pokok masalah yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah. Selain itu dalam Bab pendahuluan ini juga dipaparkan tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Konflik yang terjadi di Sahara Barat antara Maroko dan Polisario merupakan konflik yang menarik perhatian internasional bahkan campur tangan PBB yang ditunjukkan dengan dibentuknya sebuah misi perdamaian di Sahara Barat yang disebut dengan MINURSO. Sehingga Selanjutnya pembahasan yang memaparkan teori-teori tentang konflik, dan resolusi konflik serta teori-teori tentang hubungan internasional dipaparkan dalam Bab dua yaitu Kerangka Teori.

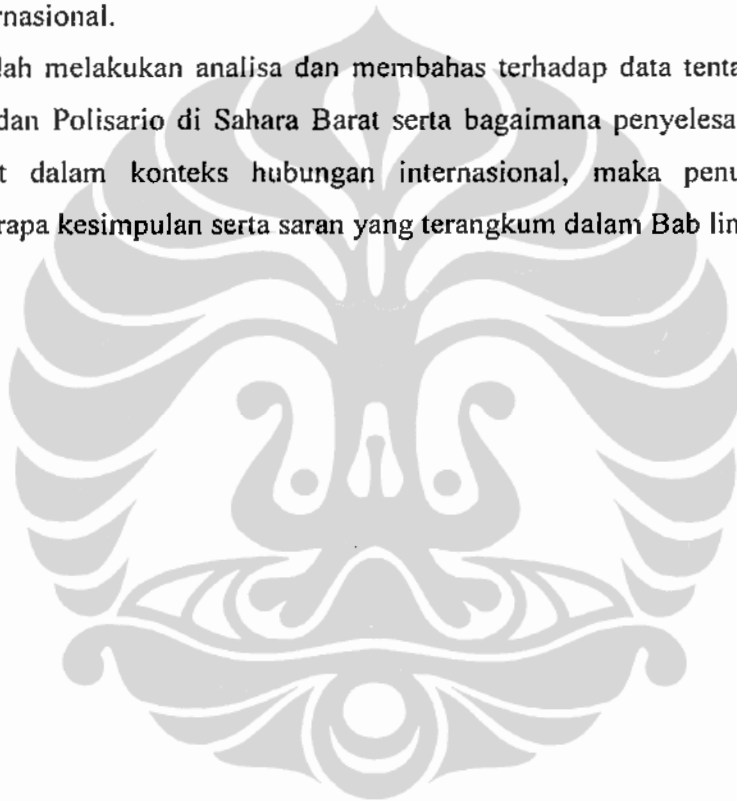
Sebuah tesis merupakan penelitian ilmiah yang tentunya membutuhkan sebuah metode yang merangkai penelitian tersebut secara sistematis serta dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini sesuai dengan definisi secara umum tentang penelitian ilmiah, "investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena."⁵ Sehingga dengan demikian dalam penelitian tentang Konflik Antara Maroko dan Polisario di Sahara Barat: Penyelesaian Konflik dalam Konteks Hubungan Internasional ini diperlukan sebuah metodologi penelitian yang terangkum dalam Bab tiga tentang metodologi penelitian. Dalam Bab tiga yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, batasan obyek masalah, karakteristik data penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan paradigma penelitian ini penulis mencoba memperkuat dasar analisis terhadap penelitian yang penulis lakukan dengan dengan latar ilmiah dan

⁵ Kuncoro, Mudrajad, 2003, "Metode Riset Untuk Riset dan Ekonomi", Erlangga, Jakarta, hal. 2

membangun alur penelitian terhadap obyek bahasan terutama terkait dengan konflik dan penyelesaian konflik di Sahara Barat antara Maroko dan Polisario.

Setelah metode dan alur penelitian diuraikan dalam Bab tiga, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data yang terangkum dalam Bab empat. Dalam Bab empat penulis mencoba memaparkan tentang sejarah dan akar konflik di Sahara Barat, Pemetaan Aktor yang terlibat dalam konflik antara Kerajaan Maroko dan Front Polisario di Sahara Barat, serta Analisis terhadap upaya Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Hubungan Internasional.

Selanjutnya setelah melakukan analisa dan membahas terhadap data tentang konflik antara Maroko dan Polisario di Sahara Barat serta bagaimana penyelesaian konflik tersebut dilihat dalam konteks hubungan internasional, maka penulis mencoba membuat beberapa kesimpulan serta saran yang terangkum dalam Bab lima.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Teori Konflik

2.1.1 Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin, *configere*, yang berarti saling memukul.⁶ Adapun Morris Janowitz dalam bukunya yang berjudul *political conflict* (1970), disebutkan bahwa, "*Conflict derives from clash of goals, both personal and social.*" Selanjutnya Janowits juga menyatakan, "*Both competition and conflict are forms of struggle. Competition, however, is continuous and impersonal, conflict intermittent and personal*".⁷

Menurut Simmel, dalam essay nya yang dikutip oleh Lewis Coser dalam bukunya yang berjudul *the functions of social conflict*, "konflik merupakan bentuk dari sosialisasi".⁸

Adapun dalam wikipedia disebutkan bahwa Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁹

Pengertian Konflik menurut A. Dahlan Nasution dalam bukunya *Politik Internasional, Konsep, dan Teori*, adalah persaingan, apakah lugas, semu, atau berupa sesuatu yang bersifat potensi, adalah suatu hal yang normal dalam, hubungan antar negara yang bermula dari perkembangan sistem negara kebangsaan.¹⁰

Thomas N. Carver menyatakan, "*There may be many cases where there is a complete harmony of interest but these give rise to no problem*

⁶ wikipedia

⁷ Morris Janowitz, 1970, "*Political Conflict*", Quadrangle Books, Chicago, kata pengantar.

⁸ Lewis Coser, 1966, "*The Functions of social conflict*", The free press, New York, hal 31

⁹ wikipedia

¹⁰ T. May Rudy, 2003, "*Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*", Refika Aditama, Bandung, hal. 76

and therefore we do not need to concern ourselves about them".¹¹ Coser mengartikan pandangan Carver tersebut bahwa, *"that only where disharmony and antagonism prevailed could one speak at all of a moral and of a scientific"*.¹² Lebih lanjut Coser menyatakan, *"conflict is ranked among the few basic forms of human interaction"*.¹³

Menurut Sholihan, secara konseptual konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individual atau kelompok) yang memiliki, atau mereka menganggap memiliki tujuan yang bertentangan.¹⁴

2.1.2 Penyebab Konflik

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

¹¹ Lewis Coser, 1956, *"The Functions of Social Conflict"*, The Free Press, New York, hal. 15

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, Coser, 1956, hal 19

¹⁴ M. Mukhsin Jamil, 2007, *"Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik"*, Walisongo Mediation Centre, Semarang, hal. 6

Menurut Donald H. Weiss dalam bukunya *Menyelesaikan Konflik Secara Bijaksana*, bahwa konflik biasanya meletus karena ketidaksepakatan, tidak terbuka, tidak bersahabat, atau tidak kooperatif. Konflik melibatkan ketidak sepakatan tentang apa yang benar, baik, atau indah, tetapi berbeda dengan ketidaksepakatan yang sederhana dalam hal setidaknya satu orang percaya, benar, atau keliru, bahwa haknya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya telah disangkal. Apa yang mungkin dimulai sebagai sebuah ketidaksepakatan sederhana menjadi "kata-kata perang".¹⁵

Menurut Sholihin, konflik terjadi ketika orang mengejar sasaran yang bertentangan¹⁶. Konflik juga meliputi semua hubungan kemanusiaan, baik hubungan sosial, hubungan ekonomi, maupun hubungan kekuasaan. Konflik muncul akibat ketidakseimbangan pada hubungan-hubungan ini, misalnya, status sosial, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak adil, seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, tekanan, dan kejahatan.¹⁷

Sholihin mengungkapkan terdapat beberapa teori besar tentang penyebab konflik yang masing-masing menunjukkan pada metode dan sasaran yang berbeda¹⁸:

a. Teori Hubungan Komunitas

Teori ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu komunitas. Sasaran kerja yang didasarkan pada teori hubungan komunitas adalah untuk memperbaiki komunikasi dan pemahaman di antara kelompok bertentangan, selain itu untuk

¹⁵ T. May Rudy, 2003, *"Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma"*, Refika Aditama, Bandung, hal. 76

¹⁶ M. Mukhsin Jamil, 2007, *"Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik"*, Walisongo Mediation Centre, Semarang, hal. 6

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, Jamil, 2007, hal. 16

mendukung toleransi yang lebih besar dan penerimaan keragaman dalam masyarakat.

b. Teori Negosiasi Utama

Teori ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak tepat serta pandangan tentang 'zero-sum' mengenai konflik yang diadopsi oleh kelompok yang bertentangan. Sasaran kerja yang didasarkan pada teori negosiasi utama adalah membantu kelompok-kelompok yang bertentangan untuk memisahkan pribadi dari masalah dan persoalan dan untuk mampu melakukan negosiasi atas dasar kepentingan mereka dan bukan atas dasar posisi mereka. Selain itu memfasilitasi kesepakatan yang menawarkan keuntungan bersama bagi kedua atau semua kelompok.

c. Teori Kebutuhan Manusia

Teori ini mengasumsikan bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia –fisik, psikologis, dan sosial – yang tidak terpenuhi atau dikecewakan. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi seringkali disebut pula sebagai kebutuhan manusia. Sasaran kerja yang didasarkan pada teori kebutuhan manusia adalah membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan memunculkan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu bagi pihak-pihak tersebut agar mencapai kesepakatan tentang kebutuhan identitas penting bagi semua pihak.

d. Teori Identitas

Teori ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh perasaan akan adanya identitas yang terancam. Perasaan semacam ini muncul karena perasaan kehilangan dan penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

Sasaran kerja yang didasarkan pada teori identitas adalah workshop dan dialog yang difasilitasi bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk tujuan mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan serta untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. Selain itu bersama-sama mencapai kesepakatan untuk mengenai kebutuhan identitas semua pihak.

e. Teori Miskomunikasi Antar Budaya

Teori ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh pertentangan antar gaya komunikasi antar budaya yang berbeda. Sasaran kerja yang didasarkan pada teori miskomunikasi antar budaya adalah meningkatkan pengetahuan masing-masing pihak yang terlibat konflik mengenai budaya masing-masing serta memperlemah stereotype negatif dari masing-masing pihak. Selain itu meningkatkan komunikasi antar budaya yang efektif.

f. Teori Transformasi Konflik

Teori ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh persoalan nyata berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ditunjukkan oleh kerangka kerja sosial, budaya, dan ekonomi yang saling bersaing. Sasaran kerja yang didasarkan pada teori transformasi konflik adalah mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk redistribusi ekonomi. Selain itu memperbaiki hubungan jangka panjang dan sikap diantara pihak-pihak yang terlibat konflik serta mengembangkan proses dan sistem yang mendukung pemberdayaan, keadilan, perdamaian, maaf, rekonsiliasi dan pengakuan.

Menurut wikipedia konflik seringkali disebabkan beberapa hal antara lain, perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi

yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.¹⁹

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Seseorang sedikit atau banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik

¹⁹ wikipedia

akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

2.1.3 Jenis Konflik

Konflik terbagi atas beberapa kelompok diantaranya yaitu, konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran/role), konflik antara

kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank), konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa), konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara), konflik antar atau tidak antar agama, konflik antar politik.²⁰

Dalam bukunya yang berjudul *The Functions of Social Conflict*, Coser menyatakan bahwa konflik terdiri dari konflik di dalam atau *in group conflict and group structur, conflict with out group and group structur*.

Malik membagi konflik atas beberapa jenis berdasarkan sebab, antara lain:²¹

Pertama, konflik yang terjadi dari adanya masalah dalam hubungan antar manusia, yang biasanya dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi dan tingkah laku negatif berulang. Komponen-komponen itu sering memunculkan konflik-konflik yang tidak realistis dan tidak perlu. Konflik jenis ini dapat terjadi di mana dan kapan saja. Bahkan tidak dalam kondisi objektif untuk munculnya suatu konflik, misalnya jenis ini cenderung memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu.

Kedua, konflik kepentingan merupakan konflik yang terjadi karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan ataupun yang secara nyata memang tidak berkesesuaian. Konflik ini terjadi karena suatu pihak lebih yakin bahwa untuk memenuhi kebutuhannya pihak lain harus berkorban. Umumnya konflik jenis ini dipicu oleh (1) masalah-masalah mendasar seperti uang, sumber daya fisik dan waktu, (2) masalah tata cara, seperti sikap dalam menanggapi suatu masalah, (3) masalah psikologis, seperti persepsi, kepercayaan, kehormatan dan keadilan.

Ketiga, konflik data merupakan konflik yang terjadi karena adanya kesalahan data atau informasi yang dibutuhkan. Selain itu, konflik jenis ini

²⁰ Wikipedia

²¹ Ichsan Malik, 2003, "*Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*", Yayasan Kemala, Jakarta, hal. 148-149

juga sering dipicu oleh (1) perbedaan cara pengumpulan informasi, (2) ketidaksepakatan tentang data yang relevan, (3) perbedaan cara menerjemahkan informasi yang diperoleh, (4) perbedaan cara pengajian data. Melihat pemicunya, seharusnya konflik jenis ini tidak terjadi jika ada komunikasi yang baik di antara para pihak yang berkonflik itu.

Keempat, konflik nilai merupakan konflik yang disebabkan oleh ketidaksesuaian sistem-sistem kepercayaan, yang hanya dirasakan atau pun yang benar-benar ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada hidupnya. Sebab, nilai menjelaskan yang baik dan yang buruk, benar atau salah, maupun adil atau tidak adil. Pada dasarnya, perbedaan nilai tidak harus memicu konflik. Manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis walaupun nilai-nilai yang dianut berbeda. Karena itu, konflik itu baru muncul jika seseorang atau suatu kelompok memaksakan suatu sistem nilai kepada seseorang atau kelompok lain. Selain itu, konflik ini juga akan muncul jika seseorang atau suatu kelompok mengklaim dan mengeksklusifkan suatu sistem nilai sekaligus tidak bersikap terhadap nilai lain.

Kelima, konflik struktural merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Posisi para pihak dalam konflik jenis ini dipicu oleh pihak penguasa. Sebab, pihak penguasa memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, sehingga pihak ini lebih berpeluang akses sumber daya dan juga mengontrolnya sekaligus menekan akses dan kontrol pihak lain. Selain wewenang formal, faktor geografis, sejarah, dan waktu seringkali digunakan sebagai alasan oleh penguasa untuk memberi keputusan-keputusan yang menguntungkan pihaknya sendiri.

Selain itu, masih menurut Malik, konflik dilihat secara wujudnya terbagi atas konflik tertutup atau laten, konflik terbuka, dan konflik mencuat. Konflik tertutup dicirikan oleh adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang dan juga tidak terangkat ke

permukaan. Karena itu seringkali para pihak yang berkonflik tersebut tidak menyadari adanya potensi konflik. Hal itu dikarenakan pada konflik laten yang belum terwujud secara terbuka, pertentangan masih dapat dirasionalisasi sehingga untuk sementara harapan dari ego masih dapat diendapkan. Berbeda dengan konflik tertutup, pada konflik mencuat para pihak yang berkonflik dapat teridentifikasi. Mereka juga mengakui adanya konflik di antara mereka. Selain itu, kebanyakan masalah yang memicu konflik juga cukup jelas. Akan tetapi, proses penyelesaian konflik tersebut belum berkembang, sedangkan pada konflik terbuka para pihak secara aktif terlibat dalam konflik. Mereka juga mungkin telah memasuki proses perundingan untuk menyelesaikan konflik itu. Pada konflik terbuka tersebut selalu terjadi ketegangan antar para pihak yang berkonflik.²²

2.1.4 Konflik Politik

"Politics is still seen as derived from the struggle and conflicts of social strata". Konflik politik terjadi tidak terlepas dari terjadinya perubahan sosial atau stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Janowitz dalam bukunya yang berjudul *political conflict*.²³

Teori umum tentang konflik social yang ditawarkan oleh Kenneth Boulding dan Lewis Coser mencoba untuk melingkupi bentuk-bentuk yang berbeda, dengan perbedaan yang paling berbeda seperti keluarga, komunitas, etnis, dan konflik sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa pemahaman tentang perang dapat menjadi test yang paling penting bagi bermacam teori umum tentang konflik social.²⁴ Selanjutnya, Janowitz menyatakan bahwa, *"despite the desire for generalized explanations of*

²² *ibid*, hal. 150

²³ Morris Janowitz, 1970, *"Political Conflict"*, Quadrangel Books, Chicago, hal. 8

²⁴ Janowitz, *Ibid*, 1970, hal. 119

social conflicts, social scientists cannot overlook the highly distinctive aspects of war as a process of political conflict"²⁵

2.2 Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Diplomasi Dan Hubungan Internasional

2.2.1 Diplomasi Dan Hubungan Internasional

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan hubungan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi dengan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.²⁶

Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik tapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus-menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.²⁷

Selanjutnya Djelantik juga mendefinisikan diplomasi, "diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi". Menurut Djelantik,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sukawarsini Djelantik, 2008, "*Diplomasi antara Teori dan Praktik*", Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 3-4

²⁷ Djelantik, *ibid*, 2008, hal. 4

untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah, di mana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi atau mengirimkan ancaman.²⁸

2.2.2 Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Internasional

Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman.

Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul kemudian beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa tentang penyelesaian sengketa. Beberapa

²⁸ *Ibid.*

perjanjian tersebut dibuat oleh negara-negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga *intergovernmental*, diantaranya :

1. The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States 1982.
2. Deklarasi Bandung 1955
3. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional 1945
4. The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes 1928
5. The General Treaty for the Renunciation of War 1928
6. The Statute of the Permanent Court of International Justice 1921
7. The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations 1919

Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga *intergovernmental* pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara. Karena LBB terbukti tidak dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya Perang Dunia II (PD II). Dari kondisi seperti itulah, negara-negara yang terlibat dalam PD II kemudian membentuk United Nations (PBB) sebagai pengganti dari LBB. Kelahiran PBB diharapkan dapat mencegah terjadinya hal serupa PD I dan II.

Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah menjadi organisasi *intergovernmental* yang besar. Dengan keanggotaan sebanyak itu, UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Pencantuman penyelesaian sengketa secara damai di dalam Piagam, memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, negara-negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

2.2.2.1 Penyelesaian Sengketa dalam Piagam PBB

Tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjaga kedamaian dan keamanan internasional tercantum di dalam pasal I Piagam, yang berbunyi :²⁹

"To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace"

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya: Negosiasi; Penyelidikan; Mediasi; Konsiliasi; Arbitrase; *Judicial Settlement* atau Pengadilan; Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.³⁰

Dari tujuh penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Piagam, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara hukum dan secara politik/diplomatik. Yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitrase dan *judicial settlement*. Sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry; mediasi; dan konsiliasi. Hukum internasional publik juga mengenal *good offices* atau jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik.³¹

Pada dasarnya, tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara

²⁹ wikipedia

³⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm. 188

³¹ *ibid*, hal. 189

mereka ke badan peradilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ/Mahkamah Internasional), tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi, ataupun cara diplomatik lainnya. PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, karena penyelesaian secara politik/diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.

2.2.2.2 Penyelesaian Sengketa secara Diplomatik

Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan *good offices* atau jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.³²

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

³² Tri Darma Yudha Pirhot Nababan, Labels: International Dispute Settlement, Public International Law

Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir.

Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan mekanisme negosiasi, antara lain :

- a. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka
- b. Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya
- c. Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
- d. Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak

2. Penyelidikan

Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka.³³

Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Penyelidikan telah dikenal sebagai salah satu

³³ Merrils, J.G, *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, hlm. 1. Teks asli dalam buku ini berbunyi: *Specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter-claim or denial by another*, hal. 27

cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

3. Mediasi

Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.

4. Konsiliasi

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang

dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

5. *Good Offices* atau Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf,³⁴ jasa baik dapat didefinisikan sebagai berikut: "*the involvement of one or more States or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement*".

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi.

³⁴ Huala Adolf, 2005, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 22

Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

Dari cara-cara penyelesaian sengketa secara diplomatik yang telah dijelaskan, negosiasi memegang peranan utama dalam penyelesaian sebuah sengketa. Karena penggunaan prosedur ini memang tidak memiliki resiko yang cukup tinggi.

Penyelesaian sengketa secara diplomatik memang menekankan kepada penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Berdasarkan hal inilah negara-negara dalam praktek hukum internasional, memberikan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa secara diplomatik melalui berbagai perjanjian internasional.

Penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik ini ditempatkan sebagai prioritas penyelesaian sengketa oleh masyarakat internasional. Apabila cara diplomatik ini gagal, penyelesaian sengketa secara hukum barulah ditempuh.

Adapun menurut Holsti, dalam Rudy, terdapat enam cara penyelesaian konflik:³⁵

Pertama, melakukan penarikan tuntutan, salah satu atau kedua belah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau mendesak perundingan memenuhi tuntutan, atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan, intinya bahwa salah satu pihak mengakhiri klaim/tuntutan dan pihak lain menerima.

³⁵ Rudy, *Opcit*, hal. 77

Kedua, penaklukan, akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan dan perundingan di antara Negara yang bermusuhan.

Ketiga, tunduk atau membentuk penangkalan, criteria yang dipakai untuk membedakan kepatuhan atau penangkalan dari penaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan cara tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukkan kepada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau mempertahankan tuntutan akan lebih besar dibanding melakukan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.

Keempat, kompromi, kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik diantara mereka jauh lebih besar dibanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatic.

Kelima, penyelesaian melalui pihak ketiga, akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasional berdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga. Bentuk penyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

Keenam, penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru.

Menurut Rudy, dalam strategi penyelesaian konflik, masalah sokongan dari negara-negara lain serta pengakuan internasional cukup berperan.³⁶ Negara-negara baru bermunculan akibat perpecahan yang terjadi dengan Negara induknya dan juga lenyapnya Negara lain karena bersatu dengan yang lainnya (integrasi). Ada pula pergantian pemerintah secara inkonstitusional. Timbulnya suatu Negara yang baru akibat dari pemisahan diri dengan Negara induknya tidak begitu saja menjadi anggota masyarakat internasional. Mereka harus mendapat pengakuan dari Negara-negara lain agar diterima sebagai komunitas masyarakat internasional.

Menurut Rudy, pengakuan tersebut bisa berupa, pertama, pengakuan tidak langsung, atau diam-diam melebihi masalah kehendak Negara yang dinyatakan dalam pemberian pengakuan. Kehendak tersebut diungkapkan hanya apabila keadaan-keadaan secara tegas mengindikasikan kemauan untuk menjalin hubungan resmi dengan baru atau pemerintah baru. Kedua, pengakuan bersyarat, Negara-negara diakui secara bersyarat berupa suatu kewajiban yang harus dipenuhi Negara tersebut. Ketiga, pengakuan kolektif, pengakuan diberikan secara terpisah antara pengakuan kepada suatu Negara dan pengakuan terhadap kepala Negara dan kepada kepala pemerintahan dari Negara baru tersebut. Dalam praktek sebagian Negara digambarkan adanya perbedaan antara pengakuan *de jure* dan *de facto*. Pengakuan *de jure* berarti menurut Negara yang mengakui, Negara maupun pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan *de facto* berarti menurut Negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa Negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta (*de facto*). (Starke, 1992: 186-187)³⁷

³⁶ Rudy, *Opcit*, hal. 78

³⁷ Rudy, *ibid*, hal. 78-79

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pengantar

Penelitian tentang Konflik antara Maroko dan Front Polisario di Sahara Barat: penyelesaian konflik dalam konteks hubungan internasional ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara garis besar metode penelitian kualitatif memiliki kekhususan dilihat dari aspek maksud dan tujuan serta pendekatan dari penelitian tersebut. Metode Penelitian Kualitatif lebih banyak menitik-beratkan pada upaya pengembangan maksud dari pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan sebagai tujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dengan memperbanyak pemahaman mendalam, berdasarkan pendekatan asumsi bahwa subyek *matter* suatu ilmu sosial berbeda dengan subyek *matter* dari ilmu fisik/ alamiah dan mempersyaratkan tujuan yang berbeda untuk inkuiri dan seperangkat metode penyelidikan yang berbeda. Induktif, berisi nilai (subyektif) holistik dan berorientasi proses.³⁸ Sedangkan kuantitatif bermaksud membuat deskripsi obyektif tentang fenomena terbatas dan menentukan apakah fenomena tersebut dapat di kontrol melalui beberapa intervensi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui proses pengumpulan data terfokus dari data nomerik, dengan pendekatan penelitian untuk menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran obyektif dan analisis numerik.³⁹ Metodologi merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan penelitian guna mendapatkan hasil yang akurat, tepat, dan dipercaya.⁴⁰

³⁸ Nuris, Anwar, 2009, "*Politik Identitas Keagamaan: Studi Kasus Tentang Gerakan Paham Keagamaan Wahabisme Dalam Identitas Kebangsaan Kerajaan Saudi Arabia*", Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 37

³⁹ Nuris, *ibid*, hal. 37

⁴⁰ Daniel, Moehar, 2003, "*Metode Penelitian Sosial Ekonomi*", PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 1

Oleh karena itu upaya untuk memahami suatu gejala atau fakta secara epistemologis perlu menggunakan teori-teori, metodologi dan teknik serta metode penelitian secara bersamaan.

Sebagaimana disebutkan oleh Pelto dikutip dari: "*science is an objective, logical, and systematic analysis of phenomena, devised to permit the accumulation of reliable knowledge*". Berdasar definisi ini, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam metodologi yang ingin peneliti kemukakan dalam bab ini, yaitu paradigma, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Dalam setiap penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan adanya metodologi agar dapat mengarahkan peneliti atau penulis kepada tujuan dan target penelitian itu sendiri. Sebagai kelaziman dalam kajian dan studi tentang masalah-masalah sosial dan politik, maka pendekatan kualitatif-lah sebagai pilihannya. Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam terhadap setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan mem-verifikasi berbagai teori atau konsep terdahulu agar dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴¹

Furchan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif sebagai proses penelitian dimana pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, ucapan-ucapan, isyarat-isyarat serta tingkah laku seseorang. Secara operasional, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari ucapan, tulisan atau perilaku yang diamati dari orang-orang itu sendiri".⁴²

Pada setiap penelitian kualitatif, diperlukan penentuan terhadap skala prioritas terhadap responden atau variabel yang ditentukan secara selektif, bukan didasarkan pada banyaknya jumlah yang akan diteliti. Maka dalam penelitian sosial diperlukan salah satu pendekatan yaitu dengan mendapatkan data primer, sekunder dan tertier-nya. Mengingat fokus utama dari penelitian ini adalah penyelesaian dan kedudukan konflik di Sahara Barat dalam konteks Hubungan Internasional, maka berbagai data

⁴¹ Hisyam, Muhammad, 1999, "*Metodologi Penelitian Sosial*", LIPI Press, Jakarta, hal. 25

⁴² Furchan, Arif, 1992, "*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*". PT Usaha Nasional, Surabaya, hal. 22.

dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditentukan untuk ditelaah secara mendasar dan mendetail.⁴³

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (holistik). Jadi, dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel hipotesis akan tetapi perlu memandang sebagian dari sesuatu keutuhan.

Sedangkan menurut Krik dan Miller (1986:9) dalam Nuris, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasan maupun dalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif menurut Williams (1995) dalam Nuris adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Dengan jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif menurut Jane Rice, adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Dari pengertian penelitian kualitatif diatas dapatlah disintesisikan bahwa penelitian kualitatif diatas adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

⁴³ Saidi, Anas, 2001, "*Metodologi Penelitian Sosial*", LIPI Press, Jakarta, hal. 19

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

3.2.1 Batasan Objek Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka diperlukan suatu kerangka kerja penelitian dengan menjadikan objek permasalahan dalam sebuah ruang lingkup yang khusus. Tujuan dari ruang lingkup yang khusus ini adalah memberikan arah paradigma pembahasan dalam penelitian yang lebih tajam dan tepat, dengan harapan hasil penelitian ini lebih objektif dan tajam. Untuk itu, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas sebagai objek penelitian ini adalah konflik antara Maroko dan Polisario di Sahara Barat dan upaya penyelesaiannya dilihat dari sudut pandang hubungan internasional.

Memahami tentang obyek penelitian di atas untuk di jadikan pedoman tentang asal mula terjadinya konflik antara Maroko dan Polisario di Sahara Barat dan keterkaitan antara pendukung masing-masing pihak dan upaya-upaya yang telah dan perlu dilakukan dalam penyelesaian konflik.

3.2.2 Karakteristik Data

Karakteristik yang ada dalam penelitian ini meliputi data kasus, dimana peneliti berusaha semaksimal mungkin mendapatkan data kasus terkait dengan penyelesaian dan kedudukan konflik di Sahara Barat dalam konteks Hubungan Internasional. Data kasus yang mayoritas penulis dapat melalui data dokumen dari berbagai sumber akan menjadi salah satu bahasan pada penelitian ini.

Berdasarkan sumbernya, sumber data umumnya berasal dari (Hanke & Reitsch, 1998: bab 3):⁴⁴

1. Data internal (berasal dari dalam organisasi tersebut) atau eksternal (berasal dari luar organisasi).
2. Data primer atau data sekunder. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dilain

⁴⁴ Kuncoro, Mudrajad, 2003, "*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*", Erlangga, Jakarta, hal. 127

pihak, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Data dokumen dalam penelitian ini lebih kepada dokumen eksternal, dimana dokumen eksternal disini berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, buletin, jurnal, dan berita yang disiarkan oleh media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan lain-lain.⁴⁵

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini selain berasal dari media massa dan hasil publikasi lainnya juga berupa dokumen yang berasal dari PBB, termasuk resolusi-resolusi yang dikeluarkan terkait dengan keberadaan misi PBB di Sahara Barat (Minurso). Pada umumnya data sekunder dipergunakan dalam empat macam kategori, yaitu: pengenalan masalah, penjelasan masalah, formulasi alternatif yang layak, dan penyelesaian permasalahan penelitian.⁴⁶

3.3. Paradigma Penelitian

Istilah paradigma yang digunakan dalam penelitian ini berdefinisi sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang, baik dalam tindakan keseharian maupun dalam penelitian ilmiah.⁴⁷ Dengan demikian setidaknya paradigma harus berisikan asumsi-asumsi dasar yang dianggap benar dan dapat diterima secara nalar.

Selanjutnya paradigma dalam dunia penelitian (*research*) secara garis besar dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu Paradigma Klasik (*Classical Paradigm*), Paradigma Konstruktifisme (*Constructive Paradigm*) dan Paradigma Kritik (*Critical Paradigm*). Perbedaan mendasar diantara ketiga jenis paradigma tersebut pada hakikatnya terdapat pada "cara pandang" (*world view*) dan cara pembahasan sebuah

⁴⁵ Moleong, Lexi J., 2006, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 219

⁴⁶ Kuncoro, *Opcit*, hal. 131

⁴⁷ Weiner, Myron., 1971, "*Political Participation: Crisis of the Political Process*", dalam Leonard Binder, et.all, eds., "*Crises and Sequences in Political Development*", Princeton University Press, New York, hal. 54

pengamatan atas gejala atau objek penelitian.⁴⁸ Dalam kaitannya dengan penelitian tentang penyelesaian dan kedudukan konflik di Sahara Barat dalam konteks Hubungan Internasional, peneliti cenderung untuk menggunakan Paradigma Klasik (*Classical Paradigm*) yang memandang realitas (objek penelitian) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran (*theoretical framework*) menurut interpretasi peneliti.

Objek yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah tentang penyelesaian dan kedudukan konflik di Sahara Barat dalam konteks Hubungan Internasional. Paradigma atau asumsi dasar penelitian ini adalah, penyelesaian konflik yang terjadi di Sahara Barat dapat ditelusuri dengan melihat kronologis konflik yang terjadi di Sahara Barat dan kedudukan konflik tersebut dari sudut pandang hubungan internasional.

3.4. Metode Penelitian

Secara garis besar metode penelitian dapat dibedakan ke dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing jenis penelitian ini memiliki metode pengumpulan data dan metode analisis data yang berbeda.⁴⁹ Dalam dunia penelitian kuantitatif lebih dikenal dengan metode penelitian survey dan eksperimen. Sementara dalam dunia penelitian kualitatif setidaknya terdapat delapan jenis metode penelitian, salah satu diantaranya adalah studi kasus (*case study*). Dalam konteks topik penelitian ini, setidaknya ia lebih tepat untuk didekati dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus.

Metode studi kasus umumnya dilakukan oleh para ilmuwan, khususnya mereka yang seringkali menggunakan etnografi dalam meneliti sejumlah etnis dan kultur dari masyarakat tertentu. Studi kasus dalam pengertian ini lebih tepat untuk dimaknai sebagai suatu metode atau pendekatan untuk memahami, menjelaskan dan menginterpretasikan suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa

⁴⁸ Andrian, Charles F., 1988, "*Political Change in The Third World*"; Unwin Hyman Press, London hal 22

⁴⁹ Easton, David., 1965, "*A Framework to Political Analysis*", N.J Prentice-Hall, Englewood Cliffs hal. 77

adanya intervensi pihak luar. Inti dari pendekatan studi kasus adalah berusaha untuk memahami suatu keputusan atau seperangkat keputusan: mengapa keputusan itu dibuat, bagaimana diimplementasikan dan apakah hasilnya.

Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus (*Case Study*). Metode penelitian studi kasus adalah suatu pendekatan mempelajari, menerangkan dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar.⁵⁰ Metode penelitian studi kasus mempunyai manfaat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hubungan nyata, menggambarkan sebuah konteks kehidupan, evaluasi, dan eksplorasi.

Inti studi kasus yaitu kecenderungan utama diantara semua ragam studi kasus adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apa yang dihasilkannya. Metode studi kasus pada dasarnya terfokus pada dua alasan:

- a. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang sifatnya spesifik, khusus, dan berskala lokal.
- b. Studi kasus banyak digunakan dalam penelitian pendidikan yang mendapat perhatian dari para pemerhati, praktisi, dan peneliti pendidikan. Pembahasan metode studi kasus diarahkan pada konsep dasar, metodologi, dan proses studi, kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga halnya jika diterapkan dalam bidang sosial politik dalam suatu negara.

Dengan paradigma fokus penelitiannya, metode studi kasus dapat digunakan apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Peneliti memiliki informasi yang tidak sedikit tentang hal yang akan diteliti.
- b. Fokus penelitiannya adalah fenomena yang sedang berlangsung.
- c. Ada banyak sumber data.⁵¹

⁵⁰ Yin, Robert K., 2004, "*Studi Kasus & Desain Metode*", PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hal.92-93

⁵¹ Yin, *ibid*, hal. 15

Masalah konflik antara Maroko dan Polisario di Sahara Barat yang menjadi konsentrasi utama dalam penelitian ini telah memenuhi ketiga unsur di atas. Informasi mengenai kronologis konflik dan penyelesaian konflik serta buku-buku tentang teori diplomasi dan hubungan internasional.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistic atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.⁵² Disamping itu data sekunder tersedia dalam bentuk lain, seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, penerbitan, agen-agen perdagangan, balai penelitian dan lain-lain. Buku-buku juga dapat digolongkan sebagai data sekunder. Prinsipnya data yang telah ada, baik yang diterbitkan atau tidak, dinamakan data sekunder. Data sekunder dapat bersifat resmi atau tidak resmi.⁵³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah studi literature terhadap dokumen. Yin menyinggung terdapat beberapa jenis dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian yaitu:⁵⁴

- a. Surat, memorandum, dan pengumuman resmi.
- b. Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa tertulis lainnya.
- c. Dokumen-dokumen administratif-proposal, laporan kemajuan, dan dokumen-dokumen intern lainnya.
- d. Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada "situs" yang sama, dan,
- e. Kliping-kliping baru dan artikel-artikel lain yang muncul di media massa.

Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber

⁵² Daniel, *Opcit*, hal. 113

⁵³ Daniel, *Opcit*, hal. 113

⁵⁴ Yin, *Opcit*, hal. 103

lain; jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan. Kedua, inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen sebagai contoh, dengan mengobservasi pola tembusan karbon dari dokumen tertentu.⁵⁵

Karena nilainya secara keseluruhan, dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data studi kasus. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan begitu penting bagi proses pengumpulan data. Untuk mempertahankan objektivitas bahasan dari data yang didapat dalam penulisan ini, penulis sangat berhati-hati dalam pengambilan dokumen, terutama terkait dengan tidak terlepasnya pengaruh intervensi orang atau organisasi atau aktor lainnya yang dengan sengaja merubah dokumen demi kepentingannya sehingga validitas dokumen tidak lagi dapat dipertahankan.

3.6. Analisis Data Kasus

Dari data primer dan data sekunder yang terkumpul, selanjutnya dilakukan klasifikasi analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini serta diinterpretasikan dalam bentuk narasi dan deskripsi (*narrative descriptive*) yang dalam metodologi penelitian lebih sering dikenal dengan metode *hermeneutic interpretative*. Dalam konteks ini setidaknya terdapat dua kategori data dasar, yaitu:

- a. Data-data dalam bentuk dokumen yang menggambarkan aturan-aturan dan kebiasaan (konvensi) yang kemudian diformalkan dalam naskah peraturan pemerintah atau negara.
- b. Data-data dalam bentuk pernyataan para elit lama dan elit baru.

Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang baik. Proses analisis data dalam studi kualitatif digambarkan oleh Strauss & Corbin sebagai berikut:⁵⁶

. . . . data are broken down into discrete parts, closely examined, compared for similarities and differences, and questions are asked about the phenomena as reflected in the data. Through this process,

⁵⁵ Yin, *Op cit*, hal. 104

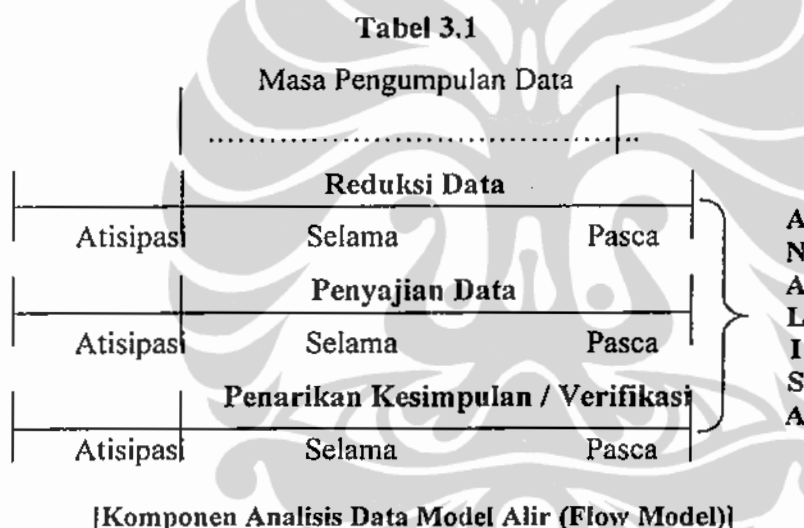
⁵⁶ Salim, Agus., 2006, "Teori dan Paradigma Penelitian Sosial", Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 21

one's own and others' assumptions about phenomena are questioned or explored, leading to new discoveries.

Senada dengan pernyataan diatas, Jorgensen mendefinisikan analisis sebagai:⁵⁷

... a breaking up, separating or disassembling of research materials into places, parts, elements, or units. With the facts broken down into manageable places, the researcher sorts and shifts them, searching for types, classes, sequences, patterns, or wholes.

Lebih lanjut Matthew B Miles & A Michael Huberman mendeskripsikan model analisis data ini dengan istilah Komponen Analisis Data Model Alir (*Flow Model*) sebagai berikut:⁵⁸

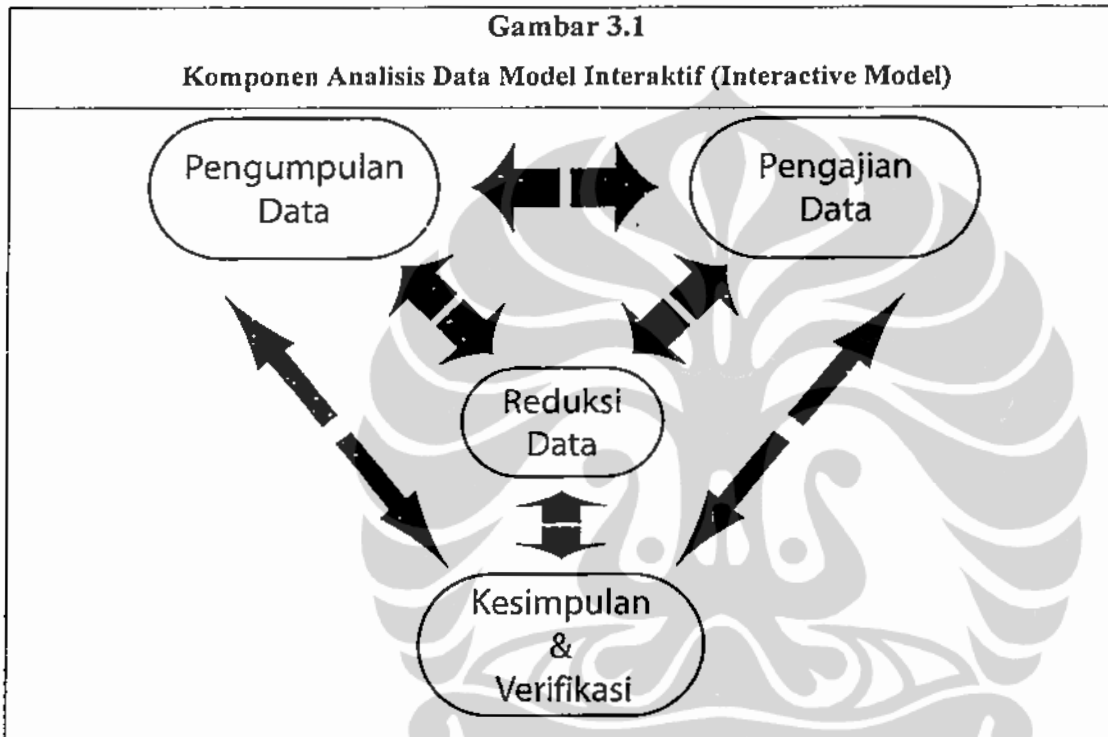


Berbeda dari analisis data pada studi kuantitatif yang dilakukan sesuai aktifitas pengumpulan data, proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Karenanya sebagaimana dinyatakan oleh Miles & Huberman, analisis data kualitatif dikatakan sebagai model alir (*Flow Model*).

⁵⁷ Poerwandari, E. Kristi., 1994, "Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi", LPSP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 26

⁵⁸ Miles, Matthew B., & Michael Huberman, 1992, "Analisis Data Kualitatif", UI Press, Jakarta, hal. 18

Meski demikian, proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan-batasan kronologis tersebut. Komponen-komponen analisis data yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Karakter yang demikian menjadikan analisis data kualitatif disebut pula sebagai model interaktif, seperti tabel berikut ini⁵⁹:



Proses-proses analisis kualitatif tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga langkah berikut.

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan

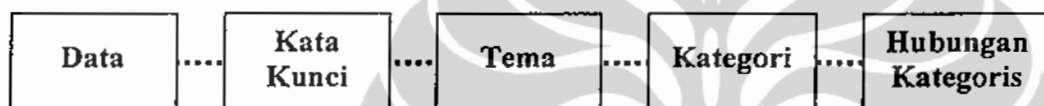
⁵⁹ Miles, *Ibid*, hal. 20

tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari permulaan pengumpulan data periset kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dilapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi.

Dengan memperhatikan dua model alur analisis di atas, secara teknis proses analisis dalam metode penelitian kualitatif dapat diilustrasikan dalam bentuk skema berikut⁶⁰.

Table 3.2



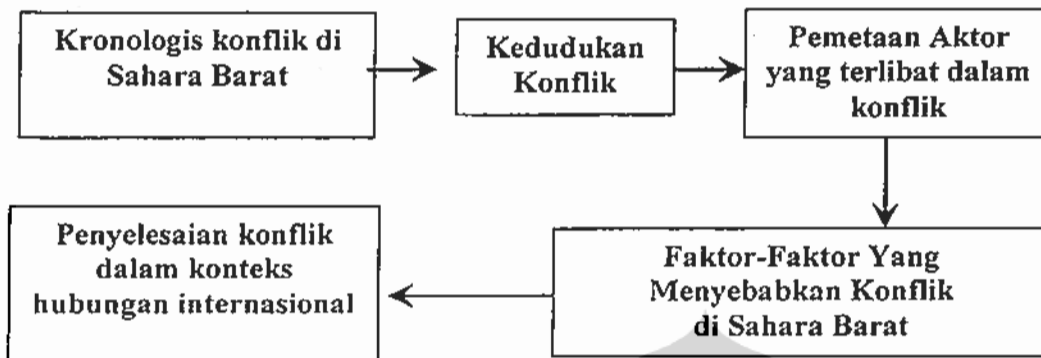
[Alur Teknis Analisis]

Dengan alur tersebut, periset kualitatif mula-mula akan membaca hasil catatan lapangan. Selanjutnya periset dapat melanjutkan aktivitas analisis dengan membuat daftar seluruh tema yang muncul dan mulai memikirkan hubungan yang mungkin ada di antara tema-tema yang muncul. Terakhir, berdasarkan catatan yang telah dimiliki, periset dapat membuat master pola yang ditemukan dan siap untuk dikemukakan sebagai laporan akhir hasil studi.

Terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini berdasar data-data yang peneliti miliki, maka tujuan dari analisis data kasus mampu menjawab bahasan yang terkonsep dalam "master pola", sebagai berikut:

⁶⁰ Poerwandari, *Opcit*, hal 95

Gambar 3.2

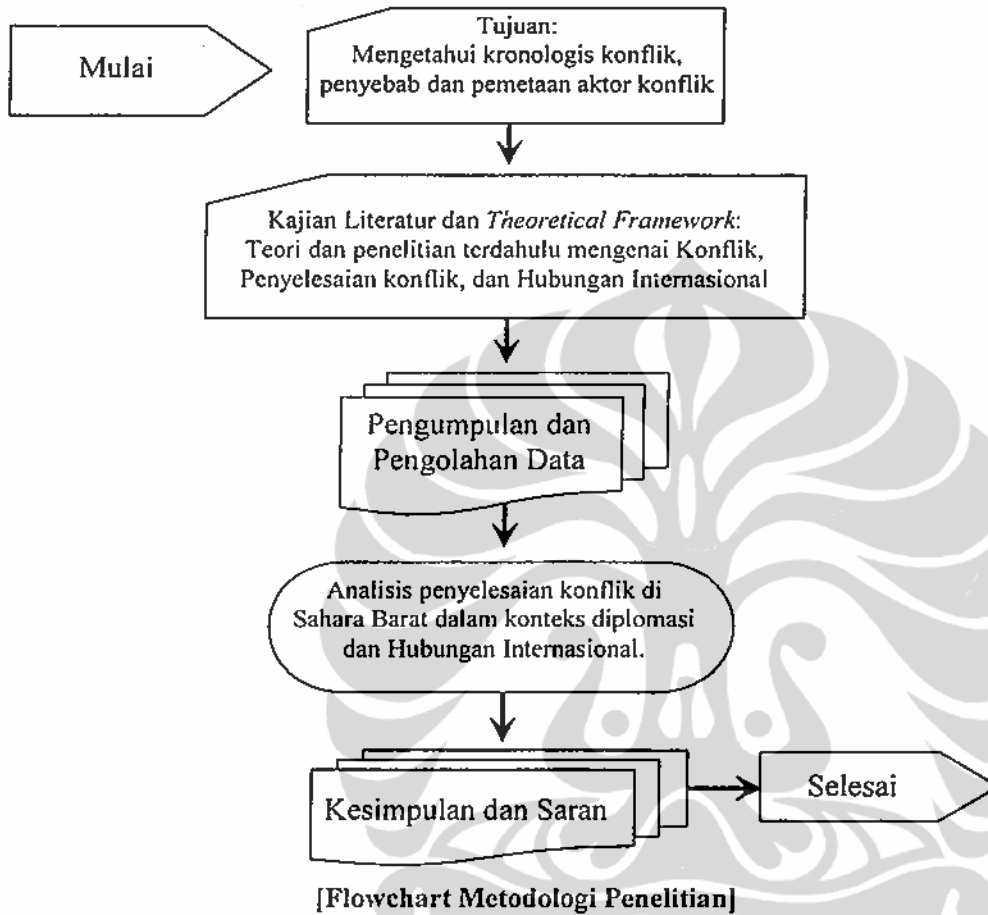


[Alur Penelitian]

Alur penelitian ini secara bertahap dapat digambarkan dalam beberapa langkah berikut:

- a. Pengumpulan data: membeli dan mem-fotocopi buku-buku dan media, mengkliping berita-berita dan laporan jurnalistik, serta memprint-out data-data yang didapat dari situs internet.
- b. Penyeleksian dan pengorganisasian data: dari hasil pengumpulan data, penulis melakukan penyeleksian dan pengelompokan berdasarkan pokok masalah tiap bab, lalu diolah secara sistematis, kemudian dirumuskan dengan menggunakan pola pemantapan isi setiap data dan informasi yang telah diolah.
- c. Analisa dan penyajian data: analisa dan penyajian data dalam penulisan penelitian ini diatur secara sistematis.

Gambar 3.3



BAB IV PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MAROKO DENGAN POLISARIO DI SAHARA BARAT

4.1 Kronologis Konflik di Sahara Barat

4.1.1 Sejarah dan Akar Konflik di Sahara Barat

Sahara Barat merupakan daerah di bagian barat laut Afrika yang belum merdeka. Di sebelah timur laut, berbatasan dengan Aljazair dan selanjutnya di sebelah utara berbatasan dengan Maroko dan dengan Mauritania di sebelah timur dan selatan. Sahara Barat terletak di Afrika Utara, berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara, antara Mauritania dan Marocco. Dia juga berbatasan dengan Aljazair di timur laut. Tanahnya kebanyakan "arid" dan tidak ramah di planet ini, tetapi kaya akan fosfat di Bou Craa. Kota terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Laayoune. Apakah daerah ini merupakan bagian dari Maroko atau milik Republik Demokratik Arab Sahrawi masih dipertentangkan. Saat ini Sahara Barat diduduki oleh Maroko, namun klaim ini tidak diakui secara global.

Sejarah tentang Sahara Barat dapat ditelusuri sejak masa penjelajahan Hanno sang Penunjuk Arah dari Carthago pada abad ke lima sebelum masehi. Namun hanya sedikit catatan sejarah yang dapat ditemukan pada periode tersebut. Sahara Barat, dalam sejarah modern memiliki hubungan dengan beberapa bangsa nomaden yang hidup dibawah hukum suku Barbar.⁶¹

*"The history of Western Sahara can be traced back to the times of Carthaginian explorer Hanno the Navigator on the 5th century BCE. Though little historical records are left from that period, Western Sahara's modern history has its roots linked to some nomadic groups living under Berber tribal rule such as the Sanhaja group and the introduction of Islam and the Arabic language beginning from the 8th century CE."*⁶²

⁶¹ Wikipedia

⁶² Ibid

Selama berabad-abad sejak abad ke 11 sampai abad ke 19 Masehi Sahara Barat merupakan penghubung antara Sub Sahara dengan Wilayah Sahara Barat. Sekitar pertengahan abad ke 11 masehi, Konfederasi Sanhaja beraliansi dengan suku Lamtuna untuk mendirikan dinasti Almoravid yang kekuasaannya saat ini meliputi Maroko, Tlemcen, semenanjung Iberia hingga ke utara meliputi Mauritania, Senegal dan Mali kemudian ke selatan meliputi kerajaan Ghana. Pada Abad ke 16 masehi, Dinasti Saadi Arab menaklukan Kerajaan Songhai yang berada di sekitar Sungai Niger. Perdagangan Trans Sahara menjadikan Sahara Barat sebagai jalur strategis antara Timbuktu yang berada di Mali dengan Marakesh.⁶³

Sahara Barat, seperti negara-negara lain di Afrika lainnya merupakan hasil dari kolonialisme Eropa di era 1880 sampai paruh pertama 1990 yang dikenal dengan nama *Scrambled for Africa*. Di era itu negara-negara utama Eropa berlomba-lomba menduduki Afrika, membagi-bagi tanahnya dan memisahkan orang-orang yang mendiami tanah itu sejak berabad-abad sebelumnya. Setelah semua negara besar di Eropa setuju, kolonisasi ini disahkan dalam Konferensi Berlin 1885. Sebagai negara Eropa yang paling lemah ketika itu, Spanyol hanya mendapatkan sepotong Sahara Barat, sehingga selanjutnya Sahara Barat dikenal juga dengan Sahara Spanyol. Sedangkan Maroko, Mauritania, dan Aljazair yang berada di sekitar Sahara Barat diduduki Prancis.⁶⁴

Konflik antara Maroko dan Front Polisario yang berlangsung sejak tahun tahun 1975 tersebut, merupakan sengketa klaim terhadap wilayah Sahara Barat yang sebelum terjadi kolonisasi berada dalam satu teritori dinasti Almoravid. Dalam konflik ini pada satu sisi Maroko meng-klaim bahwa Sahara Barat merupakan teritorinya berdasar ikatan sejarah sedangkan Front Polisario meng-klaim bahwa Sahara Barat merupakan daerah yang dicaplok oleh Maroko dan menuntut kemerdekaannya.

⁶³ Ibid

⁶⁴ Aggad, Faten, 2004, "*Western Sahara: Understanding the conflict and it's deadlock*", The African Studies Association of Australia and the Pacific, University of Western Australia, hal. 4

Sebuah konsep yang merujuk pada kekuasaan Dinasti Al Moravid sebelum konferensi Berlin, diperkenalkan oleh Partai Istiqlal, yaitu "*Greater Morocco*", konsep ini pula yang kemudian dijadikan sebuah pembenaran historis terhadap pendudukan yang dilakukan Maroko di Sahara Barat pasca mundurnya Spanyol.

4.1.2. Kronologis Konflik di Sahara Barat

Pada tahun 1956, setelah Prancis meninggalkan tanah jajahannya, Partai Istiqlal, salah satu partai utama di Maroko ketika itu memperkenalkan konsep *Greater Morocco*. Sebuah pandangan batas wilayah dimana menurut partai ini, sebelum era *Scrambled for Africa*, Maroko meliputi seluruh Mali hingga Sungai Senegal yang memisahkan dengan Senegal, sebagian Mauritania dan sebagian Maroko. Kerajaan Maroko menyambut gembira atas klaim historis ini.

Di tahun 1973, kelompok pro-kemerdekaan Sahara Barat, yang terdiri dari kaum intelektual yang menuntut ilmu di Maroko terus melanjutkan perlawanan menentang Spanyol dan pemerintah kerajaan Maroko. Beberapa dari mereka bahkan meminta dukungan dari Al Jazair, dan negara-negara di Afrika lainnya dalam aksi-aksi gerilya mereka. Dan pada saat itu, tepatnya tanggal 10 Mei tahun 1973, terbentuklah sebuah organisasi garda depan untuk kemerdekaan Sahara Barat, yaitu Front Polisario, Front Kemerdekaan Saguia el Hamra dan Rio de Oro, nama lama wilayah itu di masa pendudukan Spanyol. Organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol itu mendapatkan sambutan meluas dari masyarakat setempat. Sepuluh hari setelah dideklarasikan, Front Polisario melancarkan serangan untuk pertama kalinya terhadap angkatan darat Spanyol. Kuatnya dukungan masyarakat atas organisasi ini menjadi salah satu sebab tentara Spanyol angkat kaki dari Sahara Barat dua tahun berikutnya, yaitu tahun 1975.

Pada tahun 1974, pemerintah Spanyol mengumumkan rencana mereka meninggalkan Sahara Barat diikuti referendum untuk membentuk pemerintahan Sahara Barat. Keputusan ini terpaksa diambil menyusul desakan PBB, antara lain lewat Resolusi 1514 tahun 1960 yang meminta semua negara yang masih memiliki wilayah jajahan untuk memerdekakan wilayah jajahan itu.

Keputusan Spanyol melepaskan Sahara Barat dikecam keras Raja Hassan II dari Maroko yang selama berkuasa setelah menggantikan ayahnya, Muhammad V, memilih bersikap lunak dalam menghadapi Spanyol. Tidak seperti ayahnya, Hassan II menilai konsep *Greater Morocco* tidak realistis. Diplomasi lunak Hassan II sejauh ini terbukti efektif untuk mengembalikan beberapa wilayah kantong di dalam teritori Maroko yang masih diduduki Spanyol, seperti Ifni.

Pada Tahun 1975, PBB meminta pendapat *International Court Justice* (ICJ) di Den Haag mengenai status Sahara Barat sebelum era *Scrambled for Africa*. Pendapat itu disampaikan ICJ di bulan Oktober. Menurut ICJ, Sahara Barat merupakan *Terra Nullius* alias tanah tak bertuan sebelum Spanyol dan negara-negara utama Eropa menduduki Afrika. Catatan ICJ tentang Wilayah Sahara Barat yang tidak bertuan, adalah sebagai berikut:

*The materials and information presented to the Court show the existence, at the time of Spanish colonization, of legal ties of allegiance between the Sultan of Morocco and some of the tribes living in the territory of Western Sahara. They equally show the existence of rights, including some rights relating to the land, which constituted legal ties between the Mauritanian entity...and the territory of Western Sahara. On the other hand, the Court's conclusion is that the materials and information presented to it do not establish any tie of territorial sovereignty [own emphasis] between the territory of Western Sahara and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian entity. Thus the Court has not found legal ties of such a nature as might affect the application of General Assembly resolution 1514 (XV) in the decolonization of Western Sahara and, in particular, of the principle of self-determination through the free and genuine expression of the will of the peoples of the Territory.*⁶⁵

⁶⁵ International Court of Justice. 1975. "International Court of Justice's Advice on Western Sahara's Sovereignty", 16 October 1975. laman: http://www.afrol.com/Countries/Sahara/documents/icj_advice_1975.htm

Kecewa pada keputusan ICJ, pada tanggal enam bulan November 1975, Maroko mengorganisasikan perpindahan penduduk dari seluruh bagian wilayah Maroko sebanyak kurang lebih 350.000 orang ke Sahara Barat yang selanjutnya disebut sebagai Provinsi Selatan dari Maroko. Ratusan ribu orang ini menetap di Sahara Barat, terutama kota Bou Craa yang kaya akan fosfat.

Disaat bersamaan Sultan Hasan II, berhasil menekan Francisco Franco Bahamonde untuk membicarakan status Sahara Barat secara terbatas. Pertengahan November 1975, Maroko, Spanyol dan Mauritania mengumumkan hasil pertemuan rahasia mereka yang dikenal dengan dokumen *Madrid Accord*. Dalam dokumen *Madrid Accord*, Spanyol setuju menyerahkan Sagu el Hamra di utara kepada Maroko dan Rio de Oro di selatan kepada Mauritania. Sementara Maroko memberi kesempatan kepada Spanyol untuk melanjutkan penambangan fosfat di Baou Craa selama waktu tertentu.

Kemudian pada tanggal 18 November 1975 Spanyol mundur dari Sahara Barat dan menandatangani kesepakatan Madrid yang membagi wilayah Sahara Barat menjadi milik Mauritania dan Maroko. Akan tetapi, akibat tekanan sejumlah pihak luar, Mauritania kemudian menyatakan tidak bersedia menerima penyerahan itu. Maroko yang menerima penyerahan kekuasaan dari Spanyol langsung melakukan penyerangan ke kawasan Sahara Barat untuk menaklukkannya.

Kini giliran Polisario yang kecewa pada Spanyol. Bulan Februari 1976, Polisario dan kelompok pro-kemerdekaan lainnya mendirikan Republik Demokratik Arab Sahara (SADR). Sekretaris jenderal Polisario terpilih sebagai presiden pertama SADR. Di tahun 1982 SADR diterima sebagai anggota Organisasi Uni Afrika (sekarang Uni Afrika). Sebagai bentuk protes, Maroko memilih meninggalkan organisasi yang ikut mereka dirikan itu. Aksi protes Maroko ini berlangsung sampai sekarang.

4.2. Pemetaan Aktor-Aktor yang Terkait dalam Konflik di Sahara Barat

4.2.1 Kerajaan Maroko

Kerajaan Maroko berada di wilayah utara Afrika. Nama resminya adalah Al Mamaklah al-Magribiyah yang dalam bahasa Arab berarti kerajaan di barat. Maroko merupakan salah satu dari sekian negara Afrika yang cukup makmur dan aman. Pergolakan yang pernah terjadi yaitu ketika Prancis mengokupasi tidak menimbulkan suatu kemunduran. Dan dari negara Perancis, Maroko mulai mengenal kebudayaan barat. Masuknya kebudayaan barat menyebabkan percepatan dalam modernisasi di berbagai sektor tapi tidak menghilangkan ciri khas Maroko sendiri.

Kerajaan Maroko mencapai kemerdekaan dan menjadi protektorat Perancis (bagian dari Perancis dari *trans-Saharan empire*) pada 2 Maret 1956, selanjutnya memperoleh tambahan wilayah segera sesudahnya merdeka, setelah Spanyol menyatakan keluar dari kawasan Marruecos utara pada tanggal 7 April 1956, Tangier pada tanggal 29 Oktober 1956, dan akhirnya Tarfaya (selatan Marruecos) pada tanggal 27 April 1958.

Secara letak geografis, Kerajaan Maroko terletak di kawasan Afrika Utara, dibatasi Samudera Atlantik dan Laut Tengah, perbatasan selatan dengan Sahara Barat, timur perbatasan dengan Aljazair.

Kerajaan Maroko memiliki luas 446.550 sq km. (172.413 sq mi.) Sedikit lebih besar dari California. Ditambah dengan luas wilayah sengketa Sahara Barat yang lain menjadi 267.028 sq km atau 102.703 sq mi.

Sekarang kota-kota besar di sana merupakan kota-kota dengan tata artistik perpaduan dari budaya Eropa dan mediteran sehingga membentuk ciri khas Maroko. Casablanca, yang merupakan kota terbesar telah menjadi kota tujuan wisata seluruh dunia dan berkembang dengan sangat pesat. Ibukota Rabat dan Tangier yang merupakan kota kedua dan ketiga terbesar berkembang menjadi sebuah kota megapolitan yang sangat besar. Panorama alam kuliner yang sangat eksotik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Maroko mengandalkan pariwisata dan bisnis perfilman yang

sering mengambil tempat di Casablanca dalam menopang negara tersebut disamping sektor-sektor vital lainnya. Seperti namanya negaranya ini berbentuk monarki konstitusi dimana pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri dan para menteri sedangkan raja -dalam ini adalah Raja Mohammed VI- sebagai simbol pemersatu bangsa. Dalam parlemen yang terbagi 2 menjadi House of representatif dan House of Counsellors dimana setiap kebijakan negara harus dibawah nungan dan sepengetahuan Parlemen. Parlemen sendiri terbentuk dari pemilu secara bertingkat untuk House of Representatif dan pemilu langsung untuk House of Counsellors. Sistem pemerintahan Maroko juga mengadopsi sistem pemerintahan trias politika dimana eksekutif, legislatif dan yudikatif berdiri terpisah. Dalam sistem yuridiksinya, Maroko memiliki perangkat yuridiksi yang tidak jauh berbeda dengan perangkat yuridiksi Indonesia yang terdiri dari Communal and District Courts Administrative Tribunals, First Instance Courts ,Courts of Appeal ,Supreme Court ,Special Court of Justice ,High Court Trade Courts dan The Standing Tribunal of the Royal Armed Forces. pemerintah menjamin kebebasan setiap penduduk untuk berpolitik dan mengeluarkan pendapatnya sehingga muncul banyak koalisi partai yang jika secara garis besar bisa di bagi 3 yaitu Koalisi Buruh, koalisi Guru dan koalisi Pelajar. Wilayah negara ini dibagi menjadi 16 bagian dimana setiap bagian membawahi beberapa provinsi dn prefektur. Casablanca sendiri membawahi 8 prefektur.

Perjuangan kemerdekaan Maroko sangat berbeda dengan gerakan kemerdekaan Tunisia dan Aljazair, jika di Aljazair perlawanan merupakan perjuangan kalangan elite, sementara di Maroko perjuangan arus bawah yang dipimpin oleh Sultan sebagai pimpinan utama gerakan oposisi dan menjadi bentuk penumbuhan bagi identitas nasional Maroko. Kemerdekaan yang diperoleh dengan mengantarkan Sultan kembali menjadi figur politik yang dominan, kemudian Sultan memperkokoh otoritas ulama dalam mengecam beberapa perbuatan para sufi yang berkolaborasi dengan pihak

Perancis. Namun ketika Hasan putra Muhammad V menjadi Sultan tahun 1961, persoalan yang dihadapi Maroko adalah tuntutan liberalisasi politik yang dilancarkan oleh rakyat Maroko.

Secara formal ada tiga kekuatan politik Maroko, yaitu Front Pembela Institusi-Institusi Konstitusional (FEIC) yang merupakan partai pemerintah, partai Istiqlal dan Persatuan Kekuatan Rakyat Nasional (*Union Nationale des Forces Populaires*) yang berfungsi sebagai kekuatan oposisi negara. Akan tetapi suatu yang disayangkan ternyata Sultan Hasan memandang kekuatan oposisi bukan sebagai kekuatan politik yang diperlukan dalam mekanisme control politik yang sehat, tetapi adalah sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaan raja dan kemutlakan kekuasaannya.

Kebijakan Hasan yang tidak memperhatikan kepentingan Negara membawa lahirnya beberapa gerakan fundamentalis yang membuat situasi di Maroko tidak nyaman. Sepanjang tahun 1970-an banyak muncul gerakan fundamentalis yang melakukan penentangan terhadap Sultan. Gerakan yang paling adalah gerakan yang diusung oleh Abdul al-Salam Yasin yang berkelanjutan sampai tahun 1992M.

Gerakan ini bermula dari sebuah tarekat sufi Butsyisyiyah, tetapi pada tahun 1971M Yasin meninggalkan tarekat ini karena ia ingin merubah menjadi sebuah gerakan politik. Rencana yang dilancarkan tersebut tidak berhasil, tetapi dikarenakan Yasin seorang yang suka membaca, diwaktu dia membaca beberapa tulisan/karya orang lain memberikan gambaran kepadanya bahwa gerakan yang dia lakukan adalah suatu hal yang benar dan patut untuk diperjuangkan. Pada tahun 1974 M Yasin mengubah gerakannya dengan cara menulis surat kepada Sultan Hasan II, dengan judul "Al-Islam au al-Thufan : Risalah Maftuhah ila Malik al-Maghrib" (Islam, atau banjir : Surat terbuka kepada raja Maroko).

Isi pokok surat tersebut adalah bahwa persoalan yang dihadapi oleh Muslim adalah karena mereka sudah menyimpang dari Islam. Namun jika mereka kembali kepada Hukum Allah dan berhenti meniru Barat,

penindasan orang miskin oleh orang kaya akan terhapus. Khalifah akan menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat dan bukan seorang raja yang hidup bermalasan di istananya, semua yang buruk akan berganti dengan yang baik. Memang kalau dibaca sejarah Maroko klasik bahwa pergerakan sufi selalu berujung dengan gerakan politik dan melahirkan sebuah dinasti, seperti dinasti Murabitun dan Muwahidun yang berawal dari gerakan keagamaan.

Kehadiran surat tersebut membuat raja Hasan tersinggung, akibatnya setelah dikompromikannya dengan Abdullah Gannun (Ketua Persatuan Ulama Maroko) diputuskan supaya Yasin di masukkan ke rumah sakit jiwa, alasannya karena tidak orang yang berani menulis surat seperti itu kecuali orang yang sakit jiwa. Akhirnya Yasin menghabiskan waktunya di rumah sakit tersebut selama tiga setengah tahun (1974M-1977M). Setelah bebas Yasin melanjutkan perjuangannya dengan jalan baru yaitu dengan menerbitkan surat kabar ke-Islaman yang berjudul al-Jamaah pada tahun 1979M. Namun setelah majalah tersebut diterbitkan untuk kesekian kalinya, pada tahun 1983M edisi ke sebelas dilarang terbit di samping Yasin juga dilarang berkhotbah di masjid-masjid yang diikuti dengan tahanan rumah.

Adapun sekarang gerakan yang dipelopori oleh Yasin ini dikenal dengan al-Adl- wa al-Ihsan (keadilan dan kebajikan) yang kembali mengingatkan rakyat Maroko kepada tarekat-tarekat sufi sebelumnya. Enam bulan setelah Yasin dikenai tahanan rumah, enam orang dari pemimpin keadilan dan kebijakan ditangkap dan hal itu telah menyebabkan terjadinya demonstrasi pada bulan Mei 1990M. Demonstrasi yang diikuti sekitar 2000 orang membuat kota Rabbat lumpuh kurang lebih selama tiga jam setelah dievakuasi ternyata peserta demonstrasi tersebut sebagian besar adalah mahasiswa.

Pada sisi lain semenjak memperoleh kemerdekaan, kesulitan melanda Maroko lantaran modal mereka turut terlepas karena pada masa Protektorat Perancis Sultan menjalin kerjasama dengan pihak Eropa. Kemudian program

pembangunan tahun 1960-an gagal total yang disebabkan oleh tidak adanya usaha reformasi dalam kepemilikan tanah.

4.2.2 Polisario

Polisario, Front atau Frente Polisario, berasal dari singkatan Spanyol Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Front Populer Mewakili Pembebasan Saguia el-Hamra dan Río no Oro") adalah satu pergerakan pemberontak Sahrawi yang berjuang untuk kemerdekaan Sahara Barat dari Maroko. Polisario adalah satu peninjau dari Socialist International.⁶⁶

Pada tahun 1971 sekelompok siswa muda yang berasal dari Sahara Barat di Universitas Morocco memulai melakukan pengorganisasian menjadi sesuatu yang dikenal sebagai Embrio Pergerakan untuk Pembebasan Saguia el-Hamra dan Rio de Oro. Setelah mencoba tanpa hasil untuk memperoleh dukungan dari beberapa pemerintah-pemerintah Arab, akhirnya mendapat dukungan dari Al jazair. Pergerakan tersebut kemudian secepatnya membentuk kekuatan sampai Sahara barat yang dikendalikan Spanyol untuk memulai satu pemberontakan bersenjata.

Front Polisario secara formal didirikan pada tanggal 10 Mei tahun 1973, yang bertujuan mengakhiri kolonisasi Spanyol secara militer. Sekretaris Jenderal pertamanya adalah Sayed El-Ouali Mustapha. Pada tanggal 20 Mei ia memimpin sebuah aksi bersenjata pertama Polisario dengan menyerbu Khanga dimana satu pos militer milik Spanyol yang dikawal oleh satu regu dari Tropas Nomadas (pasukan Spanyol yang berasal dari orang-orang Sahara) berhasil dikuasai dan persenjataannya dilucuti. Polisario kemudian secara berangsur-angsur memperoleh kendali atas daerah-daerah bebatuan besar dari desa padang pasir, dan kekuatannya berkembang sejak awal 1975 ketika para Tropas Nomadas banyak yang desersi dan bergabung dengan Polisario, dengan membawa senjata-senjata

⁶⁶ Wikipedia

dan berlatih bersama kelompok Polisario. Dalam posisi ini, kekuatan Polisario diperkirakan mencapai 800 orang laki-laki dan perempuan, akan tetapi mereka juga didukung oleh suatu jaringan pendukung yang sangat besar dan luas. Pada bulan Juni 1975 sebuah misi kunjungan PBB yang dipimpin oleh Ak. Simeon dilakukan, yang menyimpulkan bahwa Sahara Barat mendapat dukungan penuh untuk merdeka berdasarkan sebuah konsensus dari masyarakat luas dan bahwa Front Polisario adalah betul-betul kekuatan paling politis dan tangguh di dalam negeri.

Pada saat Spanyol memulai bernegosiasi tentang pengambil-alihan kekuasaan pada musim panas tahun 1975, pada akhirnya rezim Franco memutuskan memberikan sebagian besar Sahara Barat kepada negara tetangganya. Setelah tekanan Maroko kepada Spanyol dengan menggunakan Green March pada tanggal 6 November 1975, Spanyol memasuki negosiasi yang menggiring pada penandatanganan kesepakatan Madrid antara Spanyol, Maroko dan Mauritania. Ketika Spanyol mundur dari Sahara Barat sebagai pelaksanaan kesepakatan Madrid pada 1976, Maroko mengambil alih daerah Saguia El Hamra seiring dengan Mauritania yang mengambil alih daerah Rio de Oro. Polisario yang didukung oleh Al Jazair memproklamasikan berdirinya Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) pada tanggal 27 Februari 1976, dan memulai perang gerilya melawan Maroko dan Mauritania. Pengadilan Dunia di Hague telah mengeluarkan keputusannya teradap bekas koloni Spanyol tersebut beberapa minggu sebelumnya, yang aman masing-masing kelompok mengklaim haknya atas daerah yang diperebutkan tersebut.

Polisario terus melakukan perang gerilya dan membangun pertahanan di Tindouf di bagian barat wilayah Al Jazair. Sampai dua tahun berikutnya gerakan tersebut sangat berkembang hingga para pengungsi dari Sahara Barat di camp-camp dan Al Jazair menyuplai persenjataan dan pendanaan. Dalam hitungan bulan, pasukan tersebut telah berkembang hingga beberapa ribu anggota pasukan bersenjata, diantaranya pasukan Unta yang diganti

dengan Jeep dan senjata musket yang berasal dari teknologi abad ke sembilan belas telah berganti dengan pasukan bersenjata senapan sergap. Reorganisasi pasukan telah memungkinkan terjadinya tingkat kerusakan yang parah melalui metode perang gerilya melawan pasukan musuh di Sahara Barat yang berasal dari Maroko dan Mauritania.

Kematian pemimpin Polisario El Ouali dalam sebuah penyerangan di Nouakchott mengakibatkan pergantian pimpinan kepada Mohammed Abdelaziz.

Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) atau Republik Demokrasi Arab Sahara yang didirikan oleh Polisario saat ini memiliki pemerintahan di pengungsian, perlemen dan kekuasaan kehakimannya semua berada di camp pengungsian di Al Jazair. Konstitusinya menjanjikan bahwa Sahara barat akan didirikan dengan sistem demokrasi multi partai dan sistem ekonomi pasar dan perusahaan bebas. Abdelaziz menjadi presidennya selama lebih dari tiga dekade. SADR merupakan anggota dari Uni Afrika, namun belum menjadi anggota PBB. SADR dan Polisario keduanya bermarkas di kemah pengungsi masyarakat Sahara Barat yang terletak di sebelah selatan Al Jazair di perbatasan kota Tindouf, akan tetapi sebagai simbol sementara ibu kota SADR adalah di Bir Lehlou, daerah tempat markas Polisario yang terletak di timur laut Sahara Barat. Secara formal ibu kota SADR merujuk pada konstitusi SADR adalah El Aaiun, yang saat ini berada di wilayah administratif Maroko.

Polisario merupakan organisasi nasionalis pertama dan terkemuka, yang memiliki tujuan utama untuk kemerdekaan Sahara Barat. Dan sudah ditetapkan bahwa perdebatan ideologi harus kiri bagi masa depan demokrasi di Sahara Barat. Hal ini menunjukkan dengan sendirinya sebuah front mencakup seluruh trend politik di kalangan masyarakat Sahara Barat, dan bukan hanya sebagai partai. Sebagai konsekuensinya, tidak adanya program partai. Walau bagaimanapun konstitusi Republik Sahara memberikan isyarat tentang konteks ideologi gerakan, yaitu, pada awal tahun 1970 Polisario

mengadopsi secara samar-samar retorika sosialis, segaris dengan kebanyakan gerakan pembebasan nasional pada waktu itu, akan tetapi hal ini dengan segera diganti. Pada akhir tahun 1970 an, referensi sosialisme dalam konstitusi republik dihilangkan dan pada tahun 1991 Polisario secara terang-terangan menyatakan pro-pasar.

Polisario menyatakan hal tersebut akan dilaksanakan setelah penentuan nasib sendiri Sahara Barat sudah tercapai. Dan hal itu bisa dilakukan dalam sistem satu partai maupun multi-partai, atau tanpa kedua sistem tersebut. Hal tersebut akan diputuskan oleh kongres Polisario ketika kemerdekaan Sahara Barat telah tercapai.

4.2.3. Kerajaan Spanyol

Kerajaan Spanyol merupakan negara di Eropa Barat Daya. Wilayahnya juga terdiri dari kota Ceuta dan Melilla di Afrika Utara, Kepulauan Canary di Samudra Atlantik, dan berbagai pulau di Laut Tengah.

Wilayah Spanyol dibatasi oleh Portugal di barat, serta Gibraltar dan Maroko di selatan. Spanyol berbatasan dengan Perancis dan Andorra di timur laut melalui Pegunungan Pyrenia. Batas lautnya adalah Samudra Atlantik di barat dan Teluk Biscay di utara serta Laut Tengah di timur, di mana Spanyol memiliki wilayah Kepulauan Balearik. Di selatan, terdapat Selat Gibraltar. Kota-kota di Spanyol dengan jumlah penduduk terbanyak ialah Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, dan Málaga.

Hubungan Spanyol dengan Sahara Barat dimulai sejak tahun 1884. Pada saat itu Spanyol melakukan persetujuan dengan negara-negara Eropa dalam konferensi Berlin untuk membagi wilayah jajahan dimana Spanyol memperoleh Sahara Barat. Maroko, Mauritania, dan Aljazair di sekitar Sahara Barat diduduki Prancis.

4.2.4 Mauritania

Republik Islam Mauritania merupakan negara yang terletak di bagian barat laut Afrika. Pesisirnya menghadap ke Samudra Atlantik, di antara Sahara Barat di sebelah utara dan Senegal di selatan.

Sejak abad kelima hingga tujuh, migrasi suku barbar dari Afrika utara menuju Bafours, penghuni asli Mauritania saat ini dan nenek moyang Soninke. Masyarakat Bafours pada awalnya merupakan masyarakat agrikultur, dan menurut sejarahnya mereka termasuk masyarakat Sahara yang pertama-tama meninggalkan gaya hidup nomaden. Seiring dengan mengeringnya Sahara secara berangsur-angsur, mereka menuju ke selatan. Mengikuti mereka, datang juga migrasi yang tidak hanya orang-orang dari Sahara tengah ke Afrika Barat, akan tetapi pada tahun 1076, orang-orang Moor yang merupakan prajurit-prajurit Islam dari kerajaan Almoravid atau Al Murabitun yang menyerang dan menaklukkan bekas kerajaan Ghana. Selama lebih dari 500 tahun, bangsa Arab menghadapi perlawanan sengit dari penduduk lokal (Barbar maupun non-Barbar) hingga akhirnya mendominasi Mauritania. Peperangan di Mauritania yang terjadi selama tiga puluh tahun, dari 1644-1674, merupakan upaya terakhir untuk mengusir Yemini Maqil, penyerbu-penyerbu Arab yang dipimpin oleh Bani Hasan. Keturunan-keturunan para prajurit dari Bani Hasan menjadi kelompok kelas atas masyarakat bangsa Moor. Bangsa Barbar mencoba menahan pengaruh dengan membentuk sebagian besar daerah Marabouts yang memelihara dan mengajarkan tradisi keislaman. Banyak suku-suku Barbar yang mengklaim diri sebagai Yemini, bahkan kadangkala mengaku Arab, yang sejatinya terdapat bukti yang sedikit yang meyakinkan hal ini.

Kolonisasi Perancis secara bertahap menyerap wilayah-wilayah yang saat ini merupakan bagian dari Mauritania dari sekitar sungai Senegal ke arah atas, sejak akhir tahun 1800 an. Pada tahun 1901, Xavier Coppolani mengambil alih misi kolonial. Menggunakan kombinasi aliansi strategis dengan suku Zawiya dan tekanan militer pada pasukan nomad dari Bani

Hassani, Xavier Coppolani, mengatur untuk memperluas pengaruh kekuasaan Perancis di wilayah tersebut hingga seluruh para penguasa Mauritania, seperti Trarza, Brakna dan Tagant yang dengan cepatnya membuat kesepakatan dengan kekuatan colonial pada rentang waktu 1903 sampai 1904. akan tetapi penguasa di wilayah utara, yaitu Adrar, bertahan lebih lama karena mendapat bantuan dari pemberontak anti kolonial, kelompok Jihad, yang dipimpin oleh Syekh Maa al Aynayn. Namun pada akhirnya Adrar berhasil ditundukan melalui kekuatan militer pada tahun 1912 dan masuk kedalam wilayah Mauritania yang telah dipersiapkan pada tahun 1904. Mauritania selanjutnya merupakan bagian dari Afrika Barat Perancis sejak tahun 1920.

Perpolitikan di Mauritania hingga saat ini masih dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya personal dan kesukuan melebihi hal-hal yang sifatnya ideologis. Dengan sedikitnya pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melatih ketergantungan kekuatan politik terhadap penguasaan sumber daya, kemampuan yang dirasakan dan integritas, kesukuan, etnis, kekeluargaan, dan pertimbangan-pertimbangan pribadi. Konflik antara bangsa Moor yang berkulit cerah, bangsa Moor yang berkulit gelap atau biasa disebut Haratin dan kelompok etnis diluar bangsa Moor (Haal, Pulaars, Soninkes, Wolofs, dan Bambaras), pemusatan bahasa, dan isu-isu lainnya, terus menerus menjadi tantangan dominan bagi persatuan nasional di Mauritania.

Birokrasi pemerintahan terdiri atas kementerian tradisional, Badan-badan khusus, dan perusahaan-perusahaan parastatal. Kementerian dalam negeri memelopori sebuah sistem ke gubernuran wilayah dan kepala daerah yang menyerupai sistem administrasi lokal di Perancis. Dalam sistem ini, Mauritania terbagi menjadi tiga belas wilayah, termasuk distrik Ibu kota, Nouakchott. Kontrol secara ketat terkonsentrasi pada kantor eksekutif pemerintahan pusat, akan tetapi beberapa pemilihan nasional dan kotapraja, sejak 1992, telah menghasilkan desentralisasi secara terbatas.

Mauritania bersama Maroko melakukan aneksasi wilayah Sahara Barat pada tahun 1976. Mauritania mengambil alih lebih rendah sepertiga wilayah kekuasaan dari yang diminta kepada Spanyol. Setelah mengalami beberapa kali kekalahan secara militer dari Polisario yang mendapat dukungan persenjataan berat dari Al Jazair, dan saingannya Maroko, Mauritania mundur dari Sahara Barat pada 1979, dan klaim atas wilayahnya di Sahara Barat diambil alih oleh Maroko. Lemahnya ekonomi Mauritania, mengakibatkan negara tersebut dianggap sepele dalam konflik di wilayah tersebut.

Setelah merdeka, Presiden Mokhtar Ould Daddah, mula-mula dilantik oleh Perancis yang memformulasikan Mauritania menjadi negara dengan sistem satu partai. Pada tahun 1964 melalui konstitusi baru yang mendorong rezim kepresidenan yang otoriter. Partai milik Daddah, Parti du Peuple Mauritanien (PPM) menjadi organisasi yang berkuasa dalam sistem satu partai. Presiden melakukan pembenaran keputusan tersebut berdasarkan pandangan dirinya yang Mauritania belum siap mengikuti sistem di Barat, yaitu sistem multi partai. Di bawah konstitusi satu partai tersebut, Daddah kembali terpilih tanpa pesaing dalam pemilihan 1966, 1971 dan 1976. Dirinya terusir dalam sebuah kudeta tidak berdarah pada tanggal 10 Juli 1978, dikarenakan hampir mengakibatkan negeri tersebut bangkrut setelah kegagalan melakukan aneksasi bagian selatan Sahara Barat dalam rangka mewujudkan mimpinya membentuk "*Greater Mauritania*".

Pada tanggal 28 Oktober 1999, menteri luar negeri Mauritania, Ahmed Sid' Ahmed dan koleganya dari Israel menandatangani sebuah kesepakatan di Washington DC, Amerika Serikat, tentang hubungan diplomatik permanen antara Israel dengan Mauritania, sebagai negara Islam dan anggota Liga Arab. Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Departemen Negara Amerika Serikat yang dihadiri oleh sekretaris negara Madeleine Albright.

4.2.5 Aljazair

Al Jazair atau sering disebut dengan nama Al Jumhuriyya al Jaza'iriya al Dimughratiya al Sha'biya adalah sebuah negara di Timur tengah terletak di kawasan Afrika Utara. Negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi ini, disamping dialek Barbar, wilayahnya berbatasan dengan Mali dan Niger di sebelah selatan, sebelah utara berbatasan dengan Laut tengah, sebelah barat dengan Mauritania, Sahara Barat, dan Maroko, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Tunisia dan Libya.⁶⁷

Nama Algeria berasal dari nama ibu kotanya Algiers yang berarti kepulauan (al-jazā'ir, dalam bahasa Arab). Ini mungkin merujuk kepada 4 buah pulau yang terletak berdekatan dengan Algiers. Algeria merupakan negara kedua terbesar di benua Afrika.

Keberadaan daerah yang sekarang menjadi Negara Aljazair ini, apabila ditelusuri mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sejak tahun 40 SM daerah ini telah diperintah oleh bangsa Romawi. Selanjutnya pada tahun 429-534 M dikuasai oleh Vandals, dan pada tahun 534-690 M kembali dikuasai oleh Bizantium atau Romawi Timur. Barulah pada abad ke 7 masehi hingga 1830 daerah ini berada dibawah kekuasaan dinasti-dinasti Islam. Pada 1830 Perancis menguasai Al Jazair, dan baru pada tanggal 3 Juli 1962 Al Jazair merdeka sebagai sebuah negara.⁶⁸

Perancis telah membuat Aljazair bagian integral metropolitannya, status yang akan mengakhiri jatuhnya Republik Keempat. Puluhan ribu pemukim dari Prancis, Italia, Spanyol, dan Malta pindah menyeberangi Laut Tengah untuk bertani di Algerian daratan pesisir dan menduduki bagian yang paling berharga dari kota-kota Aljazair, mendapatkan keuntungan dari penyitaan tanah bersama yang dipunyai pemerintah Prancis.

⁶⁷ Sihbudi, Riza, dkk., 1995, "Profil Negara-Negara Timur Tengah", Pustaka Jaya, Jakarta, hal. 1

⁶⁸ Sihbudi, Ibid, hal. 2

Pada 1954, Front Pembebasan Nasional (FLN) melancarkan perang gerilya; setelah hampir 1 dekade perang di kota dan desa, mereka berhasil memaksa Prancis keluar pada 1962. Pada 25 September 1962, Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden dari pemerintahan provinsional, dengan Ahmed Ben Bella sebagai perdana menteri.

Presiden pertama Aljazair, pemimpin FLN Ahmed Ben Bella, didepak oleh mantan sekutunya dan juga PM, Houari Boumédiène pada 1965. Negara itu kemudian menikmati hampir 25 tahun yang relatif stabil 1 partai sosialis milik Boumedienne dan para penggantinya.

Pada tahun 1976, sembilan puluh satu persen rakyat pemilih di Aljazair menyetujui suatu charter yang menetapkan bahwa sosialisme Islam dijadikan sebagai prinsip bernegara, serta dipakai sebagai landasan bagi pembentukan suatu konstitusi baru menggantikan konstitusi lama yang tidak dipakai lagi, menyusul kudet tak berdarah oleh Kolonel Houari Boumedienne tahun 1965. masih pada tahun yang sama, 99,2% dari sekitar 93% rakyat pemilih menyetujui suatu konstitusi baru, yang didalamnya mengakui suatu negara sosialis dengan sistem satu partai, Islam sebagai agama negara, dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Partai tunggal yang diakui oleh nagara itu adalah National Liberation Front (Front de Liberation Nationale, FLN) yang berfungsi sebagai guide atau pengatur rakyat menuju suatu masyarakat sosialis.⁶⁹

Pada 1990-an, Aljazair dilanda perang saudara penuh kekerasan dan berkepanjangan setelah militer menghalangi ParPol Islam, Front Keselamatan Islam mengambil kekuasaan menyusul pemilihan multipartai pertama di negeri itu. Lebih dari 100.000 orang terbunuh, kebanyakan dalam pembantaian penduduk sipil yang tak beralasan, oleh kelompok gerilyawan seperti Kelompok Islam Bersenjata.

Pada bulan Desember 1990, Majelis Rakyat Nasional mengesahkan aturan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Aljazair dan melarang

⁶⁹ Sihbudi, Ibid, hal. 16

perusahaan-perusahaan swasta dan partai politik menggunakan bahasa Perancis dan Berber. Undang-undang baru ini dianggap sebagai sikap tidak toleran pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang berlatar pendidikan Barat serta masyarakat Berber. Hal ini kemudian menyebabkan sekitar 500.000 orang turun ke jalan untuk memprotes diskriminasi agama dan politik.

Dalam hal kebijakan politik luar negeri, FLN lebih mengambil posisi radikal dengan bersikap sebagai pendukung kuat bagi gerakan Non-Blok dunia ketiga serta aktif dengan berbagai kegiatan yang diprogramkan Non-Blok. FLN juga menyerukan bagi suatu pendistribusian kesejahteraan secara luas atas ekonomi dunia dengan menuntut "harga" yang layak atas berbagai sumber daya alam yang dihasilkan oleh dunia ketiga.

Sebagai negara yang pernah merasakan kekejaman kolonialisme Perancis, Al Jazair akhirnya cenderung vokal pula mendukung berbagai gerakan pembebasan nasional. Al Jazair menjadi pendukung kuat PLO dan kelompok-kelompok nasionalis di Afrika bagian selatan. Bahkan Al Jazair menjadi pendukung gerakan Polisario (Frente Popular para la Liberacion de Saquia el Hamray Rio de Oro) yang menuntut kemerdekaan dari Maroko atas Sahara Barat. Sikap demikian telah menempatkan Maroko dan Al Jazair pada posisi "berseteru" secara samar, bahkan kadangkala sempat bentrok senjata.⁷⁰

4.3 Analisa Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Konflik di Sahara Barat

Sahara Barat sekilas hanya sebuah padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Namun, walaupun demikian sebenarnya Sahara Barat merupakan suatu daratan dengan berbagai potensi alam atau sumber daya alam utama seperti hasil tambang termasuk minyak, mineral-mineral, dan potensi ikan di lautnya yang berlimpah. Selain itu bila dilihat letaknya secara geografis,

⁷⁰ Sihbudi, Ibid, hal. 20

Sahara Barat memungkinkan untuk dijadikan wilayah kunci dilihat dari sisi geo-strategis. Dimensi-dimensi politis dan ekonomi dalam konflik di Sahara Barat cukup diwarnai oleh berbagai kepentingan para aktor yang terlibat di dalam konflik tersebut.

Untuk lebih memahami posisi-posisi negara-negara yang menjadi bagian dari konflik dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk melakukan resolusi konflik, maka perlu diketahui apa yang menyebabkan Sahara Barat menjadi wilayah yang mengundang pihak-pihak terkait terlibat dalam konflik di Sahara Barat. Dalam hal ini ada dua dimensi yang diperkirakan menjadi penyebab konflik di Sahara Barat. Pertama faktor geo-ekonomi dan kedua faktor geo-politik dan penilaian strategis.

4.3.1. Potensi Sahara Barat Dilihat Dari Sudut Pandang Geo Ekonomi Bagi Pihak-Pihak yang Terlibat Konflik

Kawasan Sahara Barat kaya akan potensi sumber daya alam. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1963 diketahui bahwa daerah Dakhla yang terletak di pantai bagian selatan berisi danau-danau bawah tanah yang penting. Hal ini memiliki dampak geo ekonomi yang penting, terutama bahwa issue tentang air telah meningkat menjadi suatu isu yang sensitive bagi banyak Negara di kawasan tersebut. Sebagaimana telah diprediksi oleh beberapa penelitian bahwa isu tentang air akan menjadi sumber utama konflik di dunia.

Selain itu Sahara Barat juga kaya akan hasil tambang fosfat, yang terkonsentrasi terutama di daerah Saguia al Hamra. Industri pertambangan fosfat saat ini menjadi urat nadi utama perekonomian di Sahara Barat, melingkupi 62% dari wilayah ekspor. Dari sudut pandang kebebasan negara Sahara Barat dengan segera, eksploitasi terhadap cadangan kekayaan fosfat secara penuh akan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di kawasan Afrika, ditambah bahwa Sahara Barat memiliki jumlah populasi yang sedikit. Pada faktanya, pada

misi PBB tahun 1975 ke daerah tersebut dengan membawa suatu konklusi bahwa jika cadangan deposit hasil bumi tersebut secara penuh dikembangkan, maka mereka akan mengelola pendapatan perkapita setara dengan negara-negara berkembang di Eropa Barat.

Western Saharan phosphates only constitute one-eighth of total Moroccan produce of its large deposits/reserves. Future exploitation of the rich deposits of phosphates at Ben Guerir, Sidi Hajjaj and Meskala will mean that Morocco does not need the Western Saharan recources.⁷¹

Menurut Aggad, meskipun demikian perlu dicatat bahwa fosfat yang berasal dari Buu Craa di Sahara Barat lebih menguntungkan untuk dieksplorasi dikarenakan fosfat di Sahara Barat lebih dekat dengan permukaan tanah dan lebih tinggi kualitasnya dibanding fosfat yang berada di Maroko. Sebagai contoh, fosfat yang berasal dari Buu Craa 80 % lebih tinggi kadarnya dibanding 68% deposit yang berada di Khourigba, dan 77 % di Youssoufia. Namun meski demikian, isu fosfat terkait konflik di Sahara Barat bukan merupakan masalah utama.

Masih menurut Aggad, banyak pengamat yang menyatakan bahwa permasalahan di Sahara Barat adalah isu tentang minyak, bahkan permasalahan minyak ini pula yang mengakibatkan kebuntuan dalam penyelesaian konflik di Sahara Barat. Menurutnya, kegagalan penyelesaian konflik yang dimediasi oleh PBB dicurigai diakibatkan oleh tarik-menarik kepentingan antara Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa di kawasan tersebut. Perusahaan-perusahaan dari Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat saat ini turut memperoleh keuntungan dari eksplorasi di Sahara Barat. Salah satunya adalah pengusaha minyak Kerr McGree yang memiliki hubungan dengan Dick Cheney (mantan Wakil Presiden Amerika Serikat) dan James Baker. Sama halnya seperti juga perusahaan Perancis, French

⁷¹ Aggad, Faten, 2004, "*Western Sahara: Understanding the conflict and it's deadlock*", The African Studies Association of Australia and the Pacific, University of Western Australia, hal. 8

Total Fina Elf, kedua perusahaan tersebut saat ini menerima kontrak dari Maroko untuk melakukan eksplorasi minyak di Sahara Barat.

Selain itu, sumber daya alam lainnya yang terdapat di Sahara Barat dan diduga secara geo strategis cukup memiliki implikasi signifikan terhadap konflik dan penyelesaiannya di Sahara Barat antara lain, bijih besi, oksida titanium, vanadium dan sumber daya ikan disepanjang 400 mil pantai yang berbatasan dengan Canaries dengan perkiraan memiliki lebih dari dua juta ton ikan setiap tahunnya.

Pelabuhan milik Sahara Barat di Laayoune, Boudjour, and Dakhla belakangan ini mendatangkan lebih dari 60 persen hasil perikanan-perikanan tahunan Maroko yang diperkirakan mencapai hampir satu juta ton. Jumlah ini dalam hitungan saat ini mencapai lebih dari 7 persen dari pendapatan ekspor Maroko yang mencapai 65,6 Milyar Rabat.⁷²

4.3.2 Geo-Politik dan Nilai Strategis Sahara Barat

Berkenaan tentang konflik di Sahara Barat, maka pada dasarnya terdapat dua hal terkait pentingnya Sahara Barat secara strategis dan politik, pertama, permasalahan tentang Sahara Barat merupakan komponen penting bagi politik nasional Kerajaan Maroko. Hal ini telah diperdebatkan oleh sebagian penulis bahwa penyelesaian konflik di Sahara Barat jika tidak menguntungkan bagi Maroko akan mendorong keruntuhan monarki di Maroko.⁷³

Dalam hal ini permasalahan tentang Sahara Barat seringkali dimanipulasi oleh pihak kerajaan dalam rangka menenangkan tensi politik didalam negeri dan mencegah perhatian rakyat Maroko dari kesalahan yang dilakukan pihak kerajaan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Leenders dalam Aggad, "*Morocco used the question of Western Sahara "in a*

⁷² Damis, J, 1983, "*Conflict in Northwest Africa : The Western Saharan Dispute*", Hoover Institute Press, California, hal. 2

⁷³ William I, dan Zunes, 2003, "*Self-Determination Struggle in The Western Sahara continues to challenge the UN*", www.fpif.org/papers/sahara2003_body.html

successful attempt to create unity and divert the attention of... [King Hassan II's] subjects from internal challenges to his regime, which especially in the 1970s has experienced serious political instability".⁷⁴

Zoubir mengungkapkan dalam Aggad bahwa dua upaya kudeta yang terjadi pada tahun 1971 dan 1972 yang diujukan pada pihak monarki memiliki dampak politik dalam negeri yang cukup serius bagi Raja Hassan II. Legitimasinya sebagai Negara kerajaan mendapat tentangan yang serius dari sekelompok militer. Untuk menghindari dari permasalahan dalam negeri, pihak kerajaan dengan segenap daya upaya menggunakan isu Sahara Barat sebagai permasalahan nasionalisme dan patriotisme. Seluruh partai politik di Maroko kemudian bersatu dibelakang klaim raja tersebut sehingga temperatur politik yang menentang kerajaan akhirnya menurun.

Kedua, status Sahara Barat sebagaimana akan ditentukan oleh referendum (atau oleh taktik lainnya, termasuk juga dengan konfrontasi militer) akan menentukan keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.

Dua skenario yang dapat dikemukakan antara lain, pertama adalah pengintegrasian Sahara Barat dengan Maroko, yang dalam kasus kongkretisasi skenario ini Kerajaan Maroko akan meluas tidak hanya secara wilayah tetapi juga demografis. Wilayah Maroko akan bertambah luas sekitar 60% melingkupi garis pantai yang lebih panjang disepanjang samudera Atlantik, yang mana hal ini akan membesarkan industri perikanan Maroko sebagai pendapatan terbesar di wilayah tersebut.⁷⁵

Furthermore the economic benefit as noted above, although marginal can be a bonus as well. An additional phosphate source will be all but harmful to the Kingdom's economy. A Moroccan Western Sahara will also change the balance of power in the region, as Morocco becomes a challenger to Algeria. Morocco's take over of Western Sahara will also encourage "Moroccan irredentism". Indeed Morocco will regain its confidence regarding its claims of the Tindouf area of Algeria.⁷⁶

⁷⁴ Aggad, Opcit, hal. 9

⁷⁵ Damis, J, 1985, Opcit, hal 138

⁷⁶ Damis, J, 1985, Ibid, hal 138

Bangsa Maroko mengaku bahwa Sahara Barat merupakan bagian dari klaim *irredentist* bahwa daerah tersebut pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan berbagai kerajaan. Para penganut paham politik *irredentism* mengkonsepsikan sebuah gagasan tentang *Grand Moroc* atau *Greater Morocco* yang menjadikan Sahara Barat menyatu dengan Maroko sebagaimana pada masa kekuasaan Dinasti Almoravid pada abad sebelas dan dua belas masehi.

Pengusung utama dari gagasan tentang *Grand Morocco* ini adalah Alla al Fassi yang merupakan pemimpin dari partai Istiqlal yang beraliran ultra nasionalis. Dia pula orang yang menyebarkan gagasan kemerdekaan Maroko pada tahun 1950 an. Setelah Maroko merdeka pada tahun 1956, dengan segera koran-koran milik partai Istiqlal, Al Alam, mempublikasikan sebuah peta gagasan tentang *Greater Morocco* pada tanggal 7 Juli 1956. Gagasan tersebut menuntut suatu bagian besar wilayah di sebelah baratdaya Al Jazair yang merupakan wilayah keseluruhan dari Sahara Barat, Mauritania, bagian utara Mali hingga ke Timbuktu, dan ke arah selatan hingga sungai senegal.⁷⁷

Pada bulan April 1957 al-Fassi mendirikan Koran mingguan *Sahara al Magrib*, yang mempropagandakan bahwa Mauritania harusnya dimasukan dalam wilayah Maroko.

Gagasan tentang 'Greater Morocco' diperkenalkan dan disinggung oleh pemerintah Maroko dalam statement-statement yang dibuat oleh Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan pihak kerajaan, dalam hal ini Raja Mohammed V sendiri yang menyampaikan dalam pidatonya pad tanggal 25 Februari 1958.

Bangsa Maroko memetakan, baik yang dicetak secara pribadi maupun pemerintahnya, hingga hari ini setelah merdeka 52 tahun mempublikasikan peta yang dibuat oleh Al Fassi. Hal ini mengindikasikan suatu kenyataan bahwa Negara tersebut belum juga menerima realitas saat ini tentang

⁷⁷ Aggad, *Opcit*, hal. 10

kemerdekaan tetangga-tetangganya dan menerima kesepakatan OAU yang menyatakan bahwa batas wilayah kemerdekaan Negara-negara bekas kolonisah ketika mereka menyatakan kemerdekaannya.

Pada bulan April 1957 pemerintah Maroko mengangkat ide al Farsi yang menyatakan Mauritania harus masuk dan bergabung dengan Maroko. Dua bulan kemudian pada tanggal 1 Juli 1957, Mokhtar Ould Daddah, selanjutnya menjadi presiden Mauritania setelah merdeka pada tahun 1960, datang dengan menyangkal klaim terhadap Sahara Barat. Daddah berkeinginan mencegah Sahara Barat jatuh dalam teritori nasional Maroko karena jika hal tersebut terjadi maka akan menghilangkan perbatasan sepanjang 980 mil milik Mauritania yang merupakan hampir separuhnya mencakup 30 mil jalur geo ekonomi strategis yang merupakan jalur kereta yang mengangkut bijih besi dari Zourate hingga Nouadhibou.

Mauritania selama pertengahan 1960 sangat tergantung terhadap jalur kereta tersebut hingga mencapai 85% dari pendapatan nilai eksportnya. Lebih jauh dari itu, selama tahun 1960 an Maroko meng-klaim dan terus melakukan klaim terhadap bagian wilayah yang luas di barat-daya Al Jazair, dalam konteks konsep 'greater Morocco'.

Oleh karena itu pada tahun 1963 klaim tersebut menggiring Maroko dan Al Jazair pada sebuah pertempuran padang pasir yang baru dapat diselesaikan setelah OUA melakukan mediasi dan mundurnya pasukan militer Maroko dari Al Jazair. Keputusan pihak kerajaan untuk mundur dari territorial Al Jazair yang telah dikuasai, menjadi keputusan yang tidak populer dan tidak beralasan bagi publik Maroko dan juga pihak militer. Oleh karena itu, ketakutan Al Jazair dan Mauritania cukup beralasan.

Skenario kedua adalah kemerdekaan Sahara Barat dari Maroko. Hal ini akan memiliki dampak yang sangat besar bagi keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut, yang akan lebih menguntungkan bagi Al Jazair. Berdirinya pemerintahan Sahara Barat yang pro-Aljazair lebih jauh lagi akan mengatasi pengaruh Maroko sebagai pemegang peranan di kawasan tersebut. Pada sisi

lain banyak analisis yang menyajikan skenario ekonomi yang menyatakan bahwa Aljazair akan memperoleh keuntungan berupa akses ke samudra atlantik dengan berdirinya pemerintahan Sahara Barat yang independen. Disamping itu legitimasi dari pernyataan ini harus diperhatikan bahwa akses Aljazair ke laut atlantik tidak akan memberikan kontribusi ekonomi secara khusus sejak sebagian besar perdagangan keluar negeri dikelola oleh Eropa. Oleh karenanya kebanyakan pelabuhan penting berada di laut mediterania bukan di atlantik.

Diskusi tentang kepentingan secara geo strategis dari Sahara Barat tidak terlepas dari keberadaan actor-aktor internasional, lebih spesifik lagi kelompok kepentingan. Menurut Aggad, *"A discussion of this nature often rotates around the role of Algeria and Mauritania in the conflict. The later is currently maintaining a lowprofile due to pressures from the United States. Meantime Algeria continues to be vocal on the matter. The country has supported liberation movements around the world since its independence in 1962. Indeed it made of such a support a key principle of its foreign policy."*⁷⁸ Dalam hal ini, dengan semangat tersebut Aljazair mendukung secara moral Front Polisario. Lebih lanjut Aljazair juga menjadi Negara yang secara langsung terkena dampak dengan mengalirnya para pengungsi ke wilayahnya. Sehingga Aljazair terus menerus memantau perkembangan di Sahara Barat.

Posisi Aljazair berkenaan dengan isu Sahara Barat juga dipengaruhi oleh ketakutannya sebagaimana disampaikan sebelumnya. Tentunya, pada tahun 1963, perbatasan perang antara Aljazair dengan tetangganya, Maroko terus menerus dipenuhi kecurigaan seperti itu.

Selain Negara-negara di kawasan tersebut yang secara geopolitik terkait dengan konflik di Sahara Barat, Negara-negara diluar kawasan tersebut juga memiliki kepentingan terhadap konflik di Sahara Barat, terutama Perancis, Spanyol dan Amerika Serikat. Perbedaan kunjungan-

⁷⁸ Aggad, Opcit, hal. 11

kunjungan kenegaraan yang dipilih oleh Spanyol maupun Perancis menunjukkan perhatian mereka terhadap kepentingan mereka di kawasan tersebut.

Spanyol, sebagaimana Al Jazair menyatakan bahwa integrasi Sahara Barat ke Maroko akan mendorong Maroko untuk melakukan ekspansi lebih jauh. Pada sisi lain Perancis tetap menjadikan Maroko sebagai partner kunci di Afrika Utara. Pada kunjungan ke Rabat di akhir tahun 2001, Presiden Perancis, Jack Chirac mengutip sebutan Sahara Barat sebagai 'provinsi paling selatan Maroko'. Negara-negara Eropa juga bersemangat tentang kemungkinan adanya perkembangan perimbangan kekuasaan di kawasan Maghrib (Afrika Utara) jika Sahara Barat menjadi Negara yang merdeka. Kepentingan Perancis dan pengaruhnya di kawasan tersebut menjadi prioritas utama pada agenda kebijakan luar negeri mereka. Sama halnya dengan Amerika Serikat yang berusaha menjaga kepentingannya di kawasan tersebut, terutama mengingat hingga saat ini Maroko diketahui masih merupakan partner strategis Amerika Serikat di Afrika Utara.

4.4 Penyelesaian Konflik di Sahara Barat Antara Maroko dengan Front Polisario Dalam Konteks Diplomasi dan Hubungan Internasional

4.4.1. Proses Penyelesaian Konflik di Sahara Barat

Konflik di Sahara Barat, antara Maroko dan Polisario telah menyebabkan kebingungan bagi pihak-pihak yang mengikuti permasalahan tersebut dari dekat. Wilayah Sahara Barat seringkali diklasifikasikan sebagai koloni terakhir di Afrika yang belum menyelesaikan proses kolonisasi.⁷⁹

Hukum internasional telah lama mengakui bahwa "semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri."⁸⁰ Empat puluh enam tahun lalu,

⁷⁹ Aggad, *Opcit*, hal. 5

⁸⁰ Pasal 1, Ayat 1 dari "Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", keduanya disetujui pada tahun 1966 dan dijalankan sejak tahun 1976.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan bahwa "rakyat di seluruh penjuru dunia sungguh-sungguh menginginkan berakhirnya berbagai bentuk kolonialisme", karena "menghalangi cita-cita PBB untuk perdamaian universal."⁸¹ Dari tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, kebanyakan negara jajahan mendapatkan kedaulatan mereka. Ketika Dewan Perwalian menyelesaikan tugasnya pada tahun 1994, wilayah-wilayah yang tak berpemerintahan sendiri (*non-self-governing*) yang ada dalam daftar PBB hanya tinggal sedikit.

Pada tahun 1985, Sekretaris Jenderal PBB, bekerjasama dengan the Organization of African Unity (OAU) atau Organisasi Kesatuan Afrika, memulai suatu misi penyelesaian konflik Sahara Barat dengan mengajukan "proposal penyelesaian" yang telah diterima pada tanggal 30 Agustus 1988 oleh Maroko dan Polisario. Di tahun 1990, Dewan Keamanan PBB menyetujui laporan Sekretaris Jenderal (S/21360) yang berisi proposal penyelesaian dan garis-besar pelaksanaannya. Pada tanggal 29 April 1991, Dewan Keamanan PBB, dalam resolusi 690 (1991), memutuskan untuk membentuk the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) atau Misi PBB untuk melaksanakan Referendum di Sahara Barat sesuai dengan laporan Sekretaris Jenderal (S/22464) dengan keterangan rencana pelaksanaannya.

Pada tanggal 6 September 1991 gencatan senjata antara Polisario dan Maroko yang dipantau oleh MINURSO dilaksanakan dengan janji bahwa pada tahun berikutnya akan dilaksanakan sebuah referéndum untuk penentuan nasib sendiri oleh masyarakat Sahara Barat. Namun yang menjadi masalah adalah dalam referendum ini terjadi perselisihan tentang siapa saja yang berhak memberi suara.

Referendum, bagaimanapun perselisihan paham pada hak pemberi suara, dan banyaknya usaha-usaha untuk mengulang proses nampak sampai

⁸¹ Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) (1960) tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan

hampir gagal. Polisario sudah berulang-kali mengancam akan memulai lagi pertempuran jika referendum tidak bisa terlaksana dan menganggap bahwa situasi yang ada bukanlah damai, maupun peperangan. Akan tetapi sampai saat ini gencatan senjata masih tetap dihormati.

Pada bulan April tahun 2007, pemerintah Maroko mengusulkan bahwa adanya suatu pemerintahan sendiri di Sahara Barat, Dewan Penasihat Kerajaan untuk Urusan Sahara Barat (Royal Advisory Council for Saharan Affairs/ CORCAS), yang memerintah wilayah tersebut dengan beberapa kewenangan secara otonomi untuk Sahara Barat. Proyek tersebut diperkenalkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan April 2007, dan dengan cepat memperoleh dukungan dari Amerika Serikat dan Perancis. Polisario sendiri telah mengajukan proposal hari sebelumnya, dan pada dasarnya tetap menuntut kemerdekaan. Hal ini mengakibatkan kebuntuan di dewan keamanan sehingga negosiasi-negosiasi kembali dilakukan secara intensif. Negosiasi-negosiasi ini dikenal dengan "Manhasset Negotiations". Tiga putaran negosiasi telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008, dengan satu negosiasi lagi direncanakan merupakan negosiasi keempat selama Maret 2008; sejauh ini, tidak ada kemajuan telah dicatat, disebabkan kedua belah pihak berkeberatan untuk bergerak dari apa yang mereka tuntut. Polisario sudah menyetujui untuk menambahkan otonomi per Moroccan proposal untuk satu surat suara referendum, tetapi berkeberatan untuk melepaskan konsep dari suatu referendum kemerdekaan sendiri, seperti yang disetujui di 1991 dan 1997. Maroko, dalam putarannya, meminta dengan tegas di hanya bernegosiasi yang arahnya perluasan kewenangan otonomi yang ditawarkan, dan berkeberatan pada tawaran kemerdekaan dalam opsi referendum.

Pada tanggal 24 Mei 1991, Sekretaris Jenderal PBB mengusulkan bahwa gencatan senjata harus mulai dilaksanakan pada tanggal 6 September. Kedua belah pihak, baik Maroko maupun Front Polisario pada saat itu menyetujui tanggal penetapan gencatan senjata dan masa transisi akan mulai

segera setelah pembagian tugas selesai. Dewan Keamanan mendukung tawaran tersebut dan sejumlah 100 pengamat militer akan disebarkan di kawasan pertempuran untuk memastikan gencatan senjata dan penghentian pertempuran di daerah-daerah tertentu. Jumlah pengamat militer kemudian meningkat menjadi 228, dan berbagai dukungan administratif dan logistik staf juga dikirim ke lapangan.

Fungsi utama MINURSO pada saat itu terbatas untuk melakukan verifikasi terhadap gencatan senjata dan penghentian pertempuran. Kantor pusat Misi didirikan di Laayoune, dengan kantor pusat di daerah utara dan selatan dari Sahara Barat. Kantor perhubungan juga didirikan di Tindouf untuk mempertahankan kontak dengan pihak berwenang Aljazair dan Front Polisario.

Pada periode transisi, namun belum dimulai, kedua belah pihak berbeda pandangan mengenai beberapa elemen rencana penting, khususnya yang berkaitan dengan kriteria yang memenuhi persyaratan untuk memberikan suara dalam referendum. Meskipun ini menjadi masalah, pihak-pihak yang berkonflik telah berulang kali menyatakan komitmen mereka untuk melaksanakan rencana tersebut dan MINURSO telah melakukan fungsinya sampai saat ini. Pada tingkatan atas, Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khusus Sekjen PBB terus mengupayakan solusi untuk menemukan kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses ini memerlukan sejumlah revisi terhadap rencana dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Komisi Identifikasi MINURSO didirikan pada bulan Mei 1993. Pada bulan Agustus 1994, setelah menyelesaikan tugas pokok yang diperlukan termasuk pengamanan kerjasama dari semua pihak, MINURSO memulai proses mengidentifikasi pemilih potensial. Prosedur dan kesulitan operasional, yang terjadi memungkinkan memperlambat kemajuan yang hendak dicapai, dan upaya untuk menyelesaikan perbedaan antara pihak-pihak yang bertikai tidak berhasil. Pada bulan Mei 1996, Sekretaris Jenderal

PBB menanggukhan proses identifikasi dan staf sipil MINURSO dipulangkan, termasuk komponen polisi dan keamanan yang diberikan kepada Komisi Identifikasi. Akan tetapi komponen Militer tetap ada untuk memonitor dan memastikan gencatan senjata, seperti yang telah dilakukan sepanjang masa transisi.

Pada awal tahun 1997, Sekretaris Jenderal PBB melakukan pemeriksaan intensif terhadap masalah utama termasuk didalamnya serangkaian pembicaraan langsung antara pihak-pihak yang bertikai, yang diselenggarakan di bawah naungan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB. Bulan September 1997, setelah berhasil menyelesaikan putaran terakhir pembicaraan, Sekretaris Jenderal PBB melaporkan bahwa semua perjanjian yang dicapai selama pembicaraan telah menunjukkan hasil.

Pada Desember 1997, Sekretaris Jenderal mengulang proses identifikasi. Meskipun mengalami sejumlah kesulitan, identifikasi semua pemohon dari suku-suku lain dari tiga kelompok peserta pemilu dilakukan hingga menjelang 3 September 1998. Namun, pihak tetap tidak bisa tiba di sebuah konsensus tentang bagaimana untuk menangani pemohon dari tiga kelompok.

Dalam upaya untuk memindahkan proses maju, Sekretaris Jenderal, pada Oktober 1998, disajikan sebuah paket tindakan untuk pihak-pihak yang disertakan pada sebuah protokol identifikasi pemohon yang tersisa dari tiga kelompok suku dan protokol pada proses naik banding. Frente POLISARIO menerima paket bulan berikutnya, dan Pemerintah Maroko, setelah mencari klarifikasi, pada prinsipnya diterima pada Maret 1999.

Dengan demikian, identifikasi dari sisa individu dari tiga kelompok suku dilanjutkan pada tanggal 15 Juni 1999. Diidentifikasi sebagai individu untuk tahun 1994 dan 1995 dan dari Desember 1997 sampai September 1998, yang naik banding dalam proses mendapat jalan pada tanggal 15 Juli ketika bagian pertama daftar sementara telah diterbitkan. 84.251 yang termasuk daftar nama calon yang memenuhi syarat untuk memberikan suara

dari 147.249 diidentifikasi. Selama enam minggu untuk naik banding periode 94-95/97-98 kelompok, Identifikasi Komisi diterima 79.000 naik banding. Identifikasi calon dari tiga suku kelompok selesai dibangun pada akhir Desember 1999. Dari 51.220 orang yang disajikan sendiri, yang ditemukan 2130 memenuhi syarat untuk memberikan suara. Periode yang menarik bagi perorangan pada kedua bagian dari daftar sementara dimulai pada 15 Januari untuk periode enam bulan.

Walaupun proses identifikasi sudah selesai, pihak-pihak yang terus terus berbeda pandangan mengenai proses naik banding, maka para pengungsi dan pemulangan dari aspek penting lainnya Rencana. Sekretaris Jenderal telah menginstruksikan kepada Perwakilan Khusus untuk melanjutkan konsultasi dengan pihak-pihak untuk mencari rekonsiliasi ini dilihat, dan untuk mencari cara-cara dan sarana untuk mencapai suatu dini, tahan lama dan menyetujui resolusi sengketa mereka atas Sahara Barat.

4.4.2 Penyelesaian Konflik di Sahara Barat Dalam Konteks Diplomasi dan Hubungan Internasional

Berdasarkan teori yang dipaparkan dalam Bab II, maka langkah-langkah dalam upaya penyelesaian konflik di Sahara Barat memerlukan negosiasi; enquiry atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan good offices atau jasa-jasa baik; konsiliasi; Arbitrase; Judicial Settlement atau Pengadilan; Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional. Dalam hal ini tentu saja berbicara konflik di Sahara Barat maka tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Uni Afrika atau OAU. Selain peranan PBB yang menaungi seluruh Negara di dunia.

4.4.2.1 Keterlibatan Organisasi untuk Persatuan Afrika /Organization for African Unity (OAU)

Permasalahan Sahara Barat hingga saat ini telah merepresentasikan tantangan yang sebenarnya bagi Uni Afrika. Beberapa alasan menopang

pendapat ini. Seperti yang dinyatakan oleh Lehtinen (2002), ketidaksepakatan di Sahara Barat telah menjadi tantangan bagi sebagian besar konsep-konsep dasar hukum internasional, termasuk juga bagi OUA prinsip dari tak dilanggarnya batas-batas bangsa afrika yang ada, hak bagi masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan hak kedaulatan dan integritas wilayah. Tantangan-tantangan ini telah menggiring badan regional tersebut untuk terlibat dalam penyelesaian konflik di Sahara Barat.⁸²

OAU merasa malu dalam keterlibatannya di isu Sahara Barat hingga akhir 1970 an. Pada tahun 1978 *Comité des Sages* (komite orang-orang bijak) berdiri dalam kerangka kerja OAU dengan tugas mempelajari permasalahan Sahara Barat. Komite tersebut terdiri dari beberapa kepala Negara diantaranya dari Mali, Nigeria, Sudan, Tanzania dan Ivory Coast. Penyelidikan memuncak dalam sebuah laporan yang disampaikan komite kepada OAU. Laporan akhir komite membuat ketetapan untuk sebuah pemungutan suara yang adil di kawasan tersebut. Kesimpulan-kesimpulan dari laporan tersebut mengarah pada pengadopsian resolusi yang telah lampau pada bulan Juli 1979.

Resolusi tersebut menetapkan bahwa kertas suara akan memasukan dua opsi di dalamnya, yaitu, opsi kemerdekaan atau opsi bergabung dengan Maroko. Selain itu referendum tersebut tidak hanya dilaksanakan bersama oleh OAU dan PBB melainkan juga bekerjasama dengan Maroko dan Polisario selama pelaksanaan pemungutan suara. Komite pelaksanaan telah ditempatkan di lokasi pelaksanaan dalam rangka menerapkan resolusi agar referendum tetap terlaksana.

Resolusi OAU telah dihasilkan tanpa isi dari pihak Maroko di dalamnya, yang mana Raja Maroko menolak untuk menghadiri summit OAU di Liberia. Menanggapi hasil laporan "Komite Orang Bijak", Menteri Luar Negeri Maroko, Mohammed Boucetta, menyatakan bahwa, "The Sahara is and will remain Moroccan". Walaupun demikian Maroko tetap menerima

⁸² Aggad, *ibid*, hal. 12

ide tentang referendum pada pertengahan tahun 1981. perubahan kebijakan ini dipengaruhi oleh keyakinan bangsa Maroko bahwa referendum akan lebih memperkuat teori pihak kerajaan bahwa Sahara Barat adalah milik Maroko. hal penting lainnya bahwa maroko menolak menerima *Frente Popular para la Liberación de Rió de Oro y Sagui el Hamra* (Polisario) sebagai kelompok independent dalam konflik dengan alasan bahwa polisario dikontrol oleh Negara tetangganya, Al Jazair. Maroko kemudian mundur dari OAU yang bermaksud menerima SADR sebagai salah satu anggotanya.

Kepentingan strategis dan maneuver politik dalam OAU telah membahayakan penanganan yang sesuai terhadap konflik Sahara Barat. Oleh karenanya OAU membatasi keterlibatannya dalam bentuk dukungan moral kepada PBB. Perkembangan organisasi ini dan metamorfosisnya menjadi Uni Afrika tidak membawa dampak terkait permasalahan di Sahara Barat, walaupun pada faktanya bahwa tujuan utama dari organisasi ini adalah mempromosikan perdamaian dan keamanan di benua Afrika. Keseriusan Uni Afrika untuk membawa kembali Maroko ke meja perundingan hingga sejauh ini dipandu secara relative oleh rendahnya profil badan benua tersebut meskipun sebagian komunike menyatakan kembali dukungannya terhadap permasalahan di Sahara Barat.

4.4.2.2 Keterlibatan PBB

PBB pertama kali menawarkan usulan untuk dilaksanakannya referendum pada saat wilayah Sahara barat masih berada dibawah kekuasaan Spanyol. Badan dunia tersebut terus menerus memantau situasi di kawasan tersebut yang mana PBB meminta Spanyol maupun Maroko kemudian untuk mengabdikan tuntutan kemerdekaan dari masyarakat di Sahara Barat. Mengikuti resolusi pertama yang berhubungan dengan Sahara Barat, yang mana telah disampaikan pada tanggal 16 desember 1965, berikut resolusi-resolusi yang telah disampaikan dalam kerangka penguatan komitmen PBB untuk membuat penentuan sikap sendiri bagi masyarakat Sahara Barat.

Pada bulan Desember 1966, sidang umum PBB menyampaikan resolusi no 2229 yang menetapkan rekomendasi tentang referendum. Resolusi tersebut meminta bahwa Spanyol mengizinkan pengembalian seluruh pengungsi namun juga memastikan bahwa hanya penduduk asli Sahara Barat yang diizinkan untuk memilih dan menyediakan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan bagi misi PBB sehingga memungkinkan untuk aktif lebih dalam lagi untuk kerjasama dan menjaga pelaksanaan referendum.

Pada bulan Desember 1985 sidang umum PBB mengadopsi resolusi 40/50, yang digunakan oleh OAU dalam pendekatan penyelesaian konflik di Sahara Barat, termasuk ide tentang referendum. Tentu saja pengakuan SADR sebagai suatu Negara yang berdaulat oleh OAU pada tahun 1982, yang diletakan sebagai dasar untuk perencanaan penyelesaian Sahara Barat (SADR telah diakui oleh 26 negara-negara Afrika pada tahun 1980). Pada saat sidang paripurna yang ke 44 pada tanggal 20 November 1990, sidang umum PBB mengeluarkan resolusi A/RES/45/21 yang menyatakan kembali dukungannya untuk upaya OAU, dan mendeklarasikan, "*the question of Western Sahara is a question of decolonization which remains to be completed on the basis of the exercise by the people of Western Sahara of their inalienable right to selfdetermination and independence.*"

Menindaklanjuti resolusi 40/50, Sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar, memulai seri kunjungannya pada akhir 1985 dan awal 1986 dengan tujuan mendamaikan para pihak yang bertikai. Upaya ini berhasil sejak kunjungan puncak dalam "perbincangan dekat", selama perwakilan dari kerajaan Maroko dan Polisario secara terpisah menyampaikan pandangan mereka kepada Sekjen PBB yang kemudian menyampaikannya pada masing-masing pihak yang berseberangan.

Walau bagaimanapun negosiasi ini gagal membawa kelompok-kelompok yang bertikai tersebut berhadapan langsung. PBB dengan tekun terus mengupayakan dengan menghormati konflik di Sahara Barat. Pada tanggal 31 Oktober 1986 resolusi 41/16 dikeluarkan. Resolusi ini meminta

Sekjen PBB untuk mengikuti situasi di Sahara Barat secara langsung dengan pandangan dalam rangka pelaksanaan resolusi pada saat itu. (resolusi 41/16).

Sebagai hasilnya pada tahun 1987 PBB dan OAU memutuskan untuk melakukan "misi teknis" bersama dengan seluruh negara di kawasan tersebut dalam kerangka persiapan gencatan senjata dan pelaksanaan referendum.

Kerjasama antara PBB dengan OAU mengarah pada penerimaan rencana "Proposal penyelesaian" oleh Maroko dan Polisario pada tanggal 30 agustus 1988. hal ini juga diikuti dengan gencatan senjata akan dipantau oleh PBB. Berkenaan dengan pelaksanaan referéndum yang rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 1990, hal itu masih dalam tahap pengorganisasian dengan masalah angka yang belum terpecahkan. Rencana penyelesaian konflik melalui referéndum gagal disebabkan beberapa alasan, yang pada dasarnya karena ketidak sepakatan dalam penentuan daftar pemilih.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Melalui penelitian yang dilakukan tentang “Konflik Antara Maroko dan Polisario di Sahara Barat: Penyelesaian Konflik Dalam Konteks Hubungan Internasional” ini dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain terkait dengan:

1. Terjadinya konflik di Sahara Barat tidak terlepas dari perjalanan historis Sahara Barat sebagai bagian dari konferensi Berlin pada tahun 1880 yang menjadikan Sahara Barat sebagai koloni Spanyol. Konflik antara Maroko dan Polisario yang menginginkan kemerdekaan Sahara Barat dimulai sejak Spanyol meninggalkan Sahara Barat dan membagi Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania. Sehingga Maroko dan Mauritania melakukan okupasi dan aneksasi ke Sahara Barat. Meskipun selanjutnya Mauritania mundur dari Sahara Barat dan menandatangani kesepakatan dengan Polisario.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut antara lain dilihat secara Geoekonomi adalah faktor kekayaan alam Sahara Barat yang kaya akan fosfat, minyak, dan hasil tambang lainnya ditambah kekayaan lautnya yang kaya akan ikan menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pihak berkeinginan menguasai Sahara Barat. Adapun dilihat secara Geo politik, dalam konteks dalam negeri Maroko pada saat itu, isu Sahara Barat seolah menjadi penenang tensi politik yang cukup panas pada tahun 1970 an. Beberapa upaya kudeta yang dilancarkan untuk menggoyang monarki Maroko dapat dieliminasi dengan isu nasionalisme dan integrasi Sahara Barat. Selain itu dalam konteks internasional, masuknya Maroko ke Sahara Barat merupakan bagian dari strategi

perang dingin yang dilancarkan pihak Barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya untuk membendung gerakan-gerakan kiri di seluruh dunia. Polisario yang berideologi kiri tentunya dikhawatirkan akan cenderung memihak pihak Timur, dalam hal ini Uni Soviet dan sekutunya. Hal ini yang kemudian menjadikan alasan Amerika Serikat dan Sekutunya termasuk Perancis untuk mendukung Maroko melakukan pendudukan di Sahara Barat. Dilihat dari sisi Geo strategis, kawasan Sahara Barat merupakan daerah kunci dan penghubung bagi daerah-daerah di sekitarnya, disamping bahwa Sahara Barat memiliki garis pantai yang mencapai 1000 mil lebih. Faktor yang lebih fundamental sebagai alasan dilakukannya aneksasi dan okupasi ke Sahara Barat bagi Maroko adalah faktor historis yang menganggap Sahara barat merupakan bagian dari Maroko sejak sebelum pembagian Afrika oleh negara-negara Eropa sebelum 1880. Faktor historis ini yang kemudian dijadikan sebuah gagasan tentang "Great Morocco".

3. Pada dasarnya upaya-upaya penyelesaian konflik di Sahara Barat telah menggunakan berbagai jalur penyelesaian konflik secara damai yang selama ini dikenal dalam lingkup hubungan internasional sebagaimana diatur dalam piagam PBB secara tegas dalam pasal 2 ayat (4) yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian konflik di Sahara Barat antara Maroko dan Polisario, penyelesaian konflik dengan menggunakan media arbitrase dan judicial settlement telah dilakukan melalui Internasional Court of Justice (ICJ) yang mengeluarkan keputusan bahwa menurut ICJ, Sahara Barat merupakan *Terra Nullius* alias tanah tak bertuan sebelum Spanyol dan negara-negara utama Eropa menduduki Afrika. Catatan ICJ

tentang Wilayah Sahara Barat yang tidak bertuan, menyatakan bahwa untuk menentukan status Sahara Barat perlu diserahkan kepada masyarakat yang menghuni di kawasan tersebut. Tentunya hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan referéndum atau pemungutan suara dengan opsi untuk berdiri sendiri atau bergabung sebagaimana klaim yang dilakukan oleh pihak Maroko. Keputusan ICJ tersebut secara hukum internasional memiliki kekuatan yang harus dipatuhi bahkan oleh PBB, sehingga klaim historis yang mendasari kerajaan Maroko untuk menjadikan Sahara Barat sebagai bagian dari teritorialnya hádala batal secara hukum, meskipun kemungkinan untuk banding terhadap keputusan tersebut masih memungkinkan. Namun yang terjadi Maroko pasca keluarnya keputusan tersebut cenderung menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik di Sahara Barat. Hal ini tidak terlepas dari rasa percaya diri Maroko terhadap dukungan yang secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan oleh kolega-kolega nya dari benua Eropa maupun Amerika. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jacque Chirac ketika menjabat sebagai presiden Perancis dalam statu kunjungannya ke Maroko bahwa Perancis tetap mendukung dan menjadikan Maroko sebagai mitra strategis Perancis di kawasan tersebut. Selain itu upaya-upaya penyelesaian konflik secara diplomatik pasca diberlakukannya gencatan senjata pada tahun 1991 telah dijalankan, diantaranya, upaya mediasi yang dilakukan oleh Uni Afrika/ OAU dan PBB yang menunjuk utusan khusus. Negosiasi yang dilakukan sebagai upaya damai baik dengan, enquiry, konsiliasi, mediasi dan good office kesemuanya tidak akan menghasilkan sebuah penyelesaian konflik di Sahara Barat selama tawaran masing-masing pihak, baik opsi kemerdekaan maupun otonomi khusus tidak berubah. Saat ini satu-satunya opsi yang mungkin dilakukan adalah

dilaksanakannya referendum penentuan nasib sendiri oleh masyarakat Sahara Barat. Namun hal ini juga akan sulit tercapai disebabkan masing-masing pihak memiliki *bargaining position* yang berimbang secara diplomatis. Dukungan Amerika Serikat dan Perancis terhadap Maroko akan selalu menjadikan permasalahan dengan melakukan tarik ulur daftar suara yang berhak mengikuti referendum. Referendum sebagaimana yang dilakukan di beberapa tempat lain (semisal Timor Timur – Indonesia) hanya akan dapat dilaksanakan bila Maroko secara ekonomi cukup lemah dan secara politik dalam negeri mengalami instabilitas serta dihentikannya dukungan Amerika Serikat dan Perancis ke Maroko.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian dalam bidang ini pada masa yang akan datang antara lain:

1. Untuk penelitian berikutnya disarankan kepada peneliti untuk melakukan proses kuantifikasi data di lapangan demi terciptanya tingkat akurasi yang lebih valid dan aktual.
2. Perlu dilakukan Penelitian langsung terhadap konflik di Sahara Barat termasuk upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Maroko dan Polisario.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andrian, Charles F., *Political Change in The Third World*, 1988, London, Unwin Hyman Press.
- Aggad, Faten, 2004, *Western Sahara: Understanding the conflict and it's deadlock*, The African Studies Association of Australia and the Pacific, University of Western Australia.
- Arif, Furchan. 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya, PT Usaha Nasional.
- Boer, Mauna, 2003, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Coser, Lewis, 1956, *The Function of Social Conflict*, New York, The Free Press.
- Damis, J, 1983, *Conflict in Northwest Africa : The Western Saharan Dispute*, California, Hoover Institute Press.
- Daniel, Moehar, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Dencik. Larts., 1992, *Etnisitet og Social Konflikt - et Konflikteoretisk perspective [Ethnicity and Social Conflict an Conflict-Theoretical Perspective]*, in Krag Helen & Margit Warburg: *Minoriteter - En grundbog; Fjorten synsvinkler på minoritetsstudier*, Spektrum, Copenhagen.
- Djelantik, Sukawarsini, 2008, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Easton, David., 1965, *A Framework to Political Analysis*, Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall
- Habib, A. Hasnan, 1997, *Kapita Selekt: Strategi dan Hubungan Internasional*, Jakarta, Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Hadi, Shaummil, 2008, *Third Debate dan Kritik Positivisme Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Hayati, Sri & Ahmad Yani, 2007, *Geografi Politik*, Bandung, Refika Aditama.
- Hisyam, M., 1999, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PMB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Jamil, M. Mukhsin, 2007, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang, Walisongo Mediation Centre.
- Janowitz, Morris, 1970, *Political Conflict; Essays in Political Sociology*, Chicago,

Quadrangle Books.

- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset Untuk Riset dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Leonard Binder, 1971, *Crises and Sequences in Political Development*, New York, Princeton University Press.
- Lofland, John & Lyn H. Lofland, 2006, *Analyzing Sosial Setting*, dalam Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Malik, Ichsan, Boedhi Wijardjo, Noer Fauzi & Antoinette Royo, 2003, *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Jakarta, Yayasan Kemala.
- Merrils, J.G., 1998, *International Dispute Settlement*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Miles, Matthew B. & Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Moleong, Lexi J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwandari, E. Kristi., 1994, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, Jakarta, LPSP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rudy, T. May, 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*, Bandung, Refika Aditama.
- Said, Abdul Aziz, Nathan C. Funk & Ayse S. Kadayifci, 2001, *Peace And Conflict Resolution In Islam*, Boston, University Press of America.
- Saidi, Anas., 2001, *Metodologi Penelitia Sosial*, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Salim, Agus., 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Samuel P.Huntington, 1996, *The Clash of civilizations and the Remaking of World Order*, London: Simon & Schulster.
- Sihbudi, Riza. Dkk., 1995, *Profil Negara-negara Timur Tengah: Buku Satu*, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Yin, Robert, K., 2004, *Studi Kasus & Desain Metode*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

TESIS

Nuris, Anwar, 2009, Politik Identitas Keagamaan: Studi Kasus Tentang Gerakan Paham Keagamaan Wahabisme Dalam Identitas Kebangsaan Kerajaan Saudi Arabia, Universitas Indonesia, Jakarta.

JURNAL

Tri Darma Yudha Pirhot Nababan Monday, July 23, 2007 at 4:24 AM Labels: International Dispute Settlement, Public International Law

INTERNET

Wikipedia, "Maroko", <http://en.wikipedia.org/wiki/Maroko>
Wikipedia, "Mauritania", <http://en.wikipedia.org/wiki/mauritania>
Wikipedia, "Spanyol", <http://en.wikipedia.org/wiki/spain>
Wikipedia, "Al Jazair", <http://en.wikipedia.org/wiki/algiers>
Wikipedia, "Polisario", <http://en.wikipedia.org/wiki/polisario>
Wikipedia, "Sahrawi Arab Democratic Republic"
http://en.wikipedia.org/wiki/sahrawi_arab_democratic_republic
Wikipedia, "Konflik", <http://wikipedia.org/wiki/Konflik>
Wikipedia, "United Nations", http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
<http://wikipedia.org>
<http://www.kompas.com>
www.un.org
http://www.afrol.com/Countries/Sahara/documents/icj_advice_1975.htm,
International Court of Justice. 1975. International Court of Justice's Advice on Western Sahara's Sovereignty, 16 October 1975.
www.fpif.org/papers/sahara2003_body.html, William I, dan Zunes, 2003, Self-Determination Struggle in The Western Sahara continues to challenge the UN.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

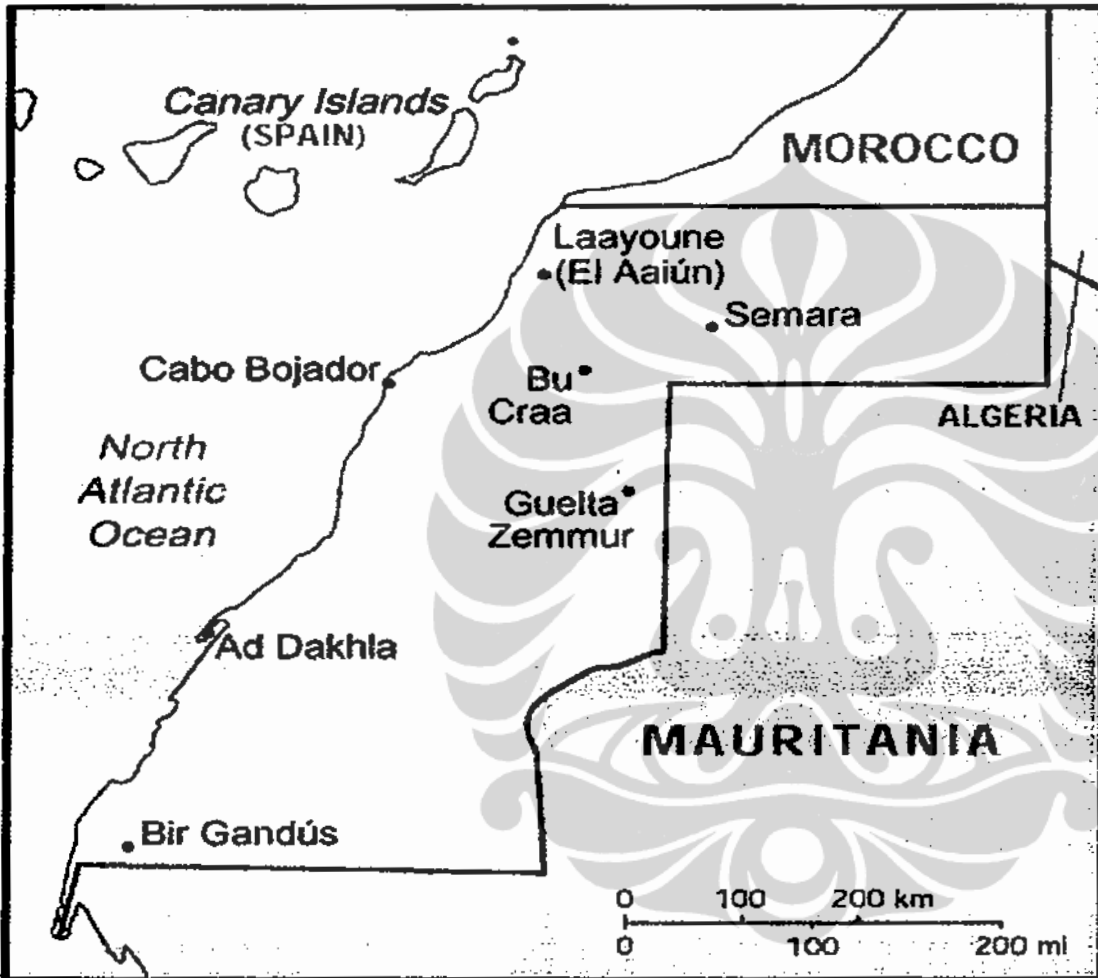
Mohammad Aliardo Lahir di Bandung, 3 Maret 1979, Merupakan putra dari pasangan Ir.H. Muta'alim dan Hj. Asna Muyasaroh. Suami dari Yuli Damayanti ini menyelesaikan program S1 dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan studi di Program Pascasarjana Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2009.

Mantan Ketua Forum Gabungan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran (Sekarang BEM KEMA Unpad) ini pernah aktif dalam berbagai aktifitas kelembagaan di kemahasiswaan baik di tingkatan nasional maupun kampus. Sebelumnya yang bersangkutan juga pernah aktif sebagai Sekretaris Presidium West Java Parliamentary Watch (WJPW) 2002-2004 dan di Yayasan Manglayang sebagai Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, 2004-2005. Saat ini yang bersangkutan aktif di Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter DKI Jakarta sebagai Direktur Support Organisasi, 2009-sekarang. Selain itu yang bersangkutan juga merupakan Analis Politik dan Hubungan Internasional di Take A Stand Indonesia Institute di Jakarta, 2005-sekarang.

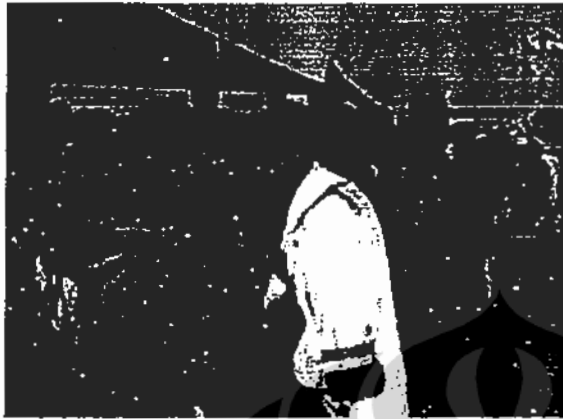
Pengalaman kerja, Sales Credit Card, City Bank (Januari –Juni 2001); Sekretaris Eksekutif, Center for Bureaucracy Studies/ CBS (Februari – Mei 2005); Project Officer, MDN Syndicate/ Event Organizer (Agustus – September 2005); Manajer Operasional, PT. Cahaya Profetis/ Distributor Consumer Goods (2005-2006); Koordinator Penelitian, Institute for Media and Social Studies/ IMSS (2006-2007); Jurnalis, Tabloid Kampus (2006-2007); Research Project Officer, Ridep Institute (Agustus – September 2007); Asisten Presiden Komisaris, LP3I Group (2007-Sekarang)

LAMPIRAN I

Peta Sahara Barat



LAMPIRAN II
Foto-Foto



Sekjen Polisario Mohamed Abdelaziz (baju putih)



Parade Pasukan Sahara Barat Tahun 2005



Ulang Tahun 32 Angkatan Bersenjata Sahara Barat